EKONOMI ISLAM DI TENGAH PANDEMI | **CUKONG SEKITAR PILKADA**

GATRA

#PHYSICALDISTANCING

POROS JK-ANIES-RIZIEQ

KEMBALINYA MUHAMMAD RIZIEQ SHIHAB MEMANTIK ISU PEMBENTUKAN POROS POLITIK BARU, BERSAMA JUSUF KALLA DAN ANIES BASWEDAN. MENGUBAH LANSKAP PERPOLITIKAN NASIONAL.

19-25 NOVEMBER 2020 4 XXVII
9 770853 170601
Rp 42.500 (Luar Jawa Rp 43.500)

GATRA AWARDS & ANNIVERSARY CHARITY

01 Desember 2020

DAFTAR ISI

No. 4 Tahun XXVII 19-25 November 2020

ANTARA FOTO/HO/AMA

Kulit Muka:
DIOLAH DARI ANTARA FOTO

DOK. PRIBADI

Semua artikel ini bisa diakses melalui :
www.gatra.com

Rekind Konsisten Ikut Membangun Negeri

Menjelang usianya yang ke-40 Agustus tahun depan, Rekind tetap konsisten dengan komitmennya untuk meningkatkan andilnya membangun negeri.

Dok. Rekind

Proyek Gas Processing Facility (GPF) Lapangan Unitisasi Gas – Jambaran Tiung Biru (JTB): Salah satu proyek strategis nasional yang dikerjakan Rekind.

Di tengah merebaknya pandemi Covid-19, PT Rekayasa Industri (Rekind), Anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero), tetap menunjukkan komitmennya untuk turut membantu menuntaskan sejumlah proyek strategis nasional. Di bawah kepemimpinan Alex Dharma Balen, selaku Direktur Utama yang baru menjabat akhir Agustus 2020 ini, Rekind menyatakan komitmennya untuk berperan lebih besar lagi dalam menuntaskan proyek-proyek strategis nasional.

Sejauh ini, Rekind telah berperan besar dalam berbagai proyek penting, di antaranya Proyek Gas Processing Facility (GPF) Lapangan Unitisasi Gas – Jambaran Tiung Biru (JTB), Bojonegoro, Jawa Timur, milik PT Pertamina EP Cepu (PEPC) – anak perusahaan PT Pertamina (Persero). Rekind yang tergabung dalam konsorsium bersama JGC IND juga berhasil melakukan pengangkatan Heavy Equipment Selexol dan Regenerator dengan total berat 760 Ton.

Rekind juga berpartisipasi aktif dalam pengerjaan proyek PLTU Lombok CFSPP FTP-2 (2x50MW) di Sambelia, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

Rekind bersama Rafako S.A (perusahaan pabrikan Boiler asal Polandia) dipercaya untuk mendukung program kelistrikan nasional 35.000 MW dan secara khusus untuk mempercepat peningkatan rasio elektrifikasi di Lombok, NTB.

Di akhir tahun 2019, Rekind juga telah menyelesaikan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Muara Laboh di Kabupaten Solok Selatan, Sumatra Barat, berkapasistas 85 MW milik PT Supreme Energy Muara Laboh (SEML). Saat ini Rekind juga tengah melaksanakan Proyek PLTP Rantau Dedap berkapasitas 98,4 MW (2 unit). Proyek milik PT Supreme Energy Rantau Dedap (SERD) ini nantinya akan memasok listrik pada system kelistrikan wilayah Sumatera Selatan.

Proyek RDMP dan Ketahanan Energi

Rekind juga berprestasi dalam pembangunan proyek strategis nasional lainnya, seperti dalam proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan.

Dalam menggarap proyek milik PT Pertamina (Persero) itu Rekind tergabung melalui Joint Operation (JO) bersama tiga perusahaan EPC dari dalam dan luar negeri yaitu PT Pembangunan Perumahan (PP), Hyundai Engineering Co., Ltd. (HEC) dan SK Engineering & Construction Co., Ltd. (SKEC).

Pembangunan RDMP Balikpapan diharapkan akan meningkatkan kapasitas kilang Balikpapan menjadi 360 ribu barrel per hari dari kapasitas sebelumnya 260 ribu barrel per hari. Selain itu juga akan meningkatkan volume produk yang dihasilkan kilang Balikpapan. Di antaranya produksi solar sebesar 23 persen atau 30 ribu barrel per hari, gasoline menjadi 100 ribu barrel per hari dan LPG menjadi 1500 ton per hari. Selain itu Kilang Balikpapan juga akan menghasilkan produk baru propilen sebesar 230 ribu ton per tahun.

Alex Dharma Balen juga menegaskan komitmennya bahwa Rekind siap mendukung program proyek strategis nasional di bidang ketahanan pangan. Terutama, program ketahanan pangan yang digagas Presiden Joko Widodo di Kalimantan Tengah. Dalam hal ini Rekind punya kemampuan dalam pembangunan pabrik pupuk.

Alex Dharma Balen optimis Rekind mampu berperan di proyek strategis yang penting ini. Sejauh ini Rekind terbukti berhasil menyelesaikan banyak proyek industri skala besar seperti pabrik pupuk, pabrik kimia dan petrokimia, pabrik biofuel, proyek minyak dan gas, serta proyek pembangkit listrik dan infrastruktur, bahkan kualitasnya sudah mencapai kelas dunia. Proyek-proyek Rekind juga tersebar di berbagai daerah di Indonesia, bahkan hingga Malaysia, dan Brunei Darussalam. Alex Dharma Balen mengaku bangga karena Rekind telah menjadi agen pembangunan di bidang teknologi rancang bangun, bagi kemajuan bangsa dan negara.

Instruksi Prokes Mendagri Ancam Kepala Daerah

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan instruksi penegakan protokol kesehatan (prokes) menyusul seringnya terjadi kerumunan massa beberapa waktu terakhir.

Menurut Tito, aturan ini dikeluarkan menindaklanjuti arahan Presiden pada Senin lalu untuk menegaskan konsistensi kepatuhan dalam usaha pencegahan penyebaran virus Covid-19. "Berkaitan dengan beberapa daerah yang terjadi kerumunan besar akhir-akhir ini dan seolah tidak mampu menanganinya, maka hari ini saya keluarkan instruksi Mendagri tentang penegakan prokes," Tito menegaskan dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Rabu lalu.

Mantan Kapolri ini juga menyebutkan, instruksi itu dikeluarkan agar kepala daerah lebih disiplin melakukan penanganan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang bisa terjadi selama penanggulangan pandemi.

Karena ada konsekuensi bagi para pejabat di daerah, berupa pencopotan jika tidak melakukannya. Ini sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, di mana jika kepada daerah melanggar ketentuan dalam undang-undang maka bisa diberhentikan.

"Saya sampaikan kepada gubernur, bupati, dan wali kota untuk mengindahkan instruksi ini, karena ada risiko menurut UU. Kalau UU dilanggar, dapat dilakukan pemberhentian," kata Tito. Ia juga menginstruksikan kepala daerah untuk secara tegas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat, termasuk aturan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Menurutnya, langkah proaktif diperlukan untuk menegakkan prokes. "Lakukan langkah proaktif, tidak hanya responsif reaktif, karena mencegah lebih baik daripada menindak," ia menjelaskan.

Tito mengatakan pencegahan yang dia maksud termasuk dengan membubarkan kerumunan massa. Ia pun meminta kepala daerah memberikan contoh dan menjadi teladan bagi masyarakat.

"Mencegah dapat dilakukan secara humanis termasuk dengan membubarkan kerumunan secara tegas dan terukur. Saya meminta kepala daerah untuk menjadi teladan mematuhi prokes, termasuk tidak ikut dalam kerumunan yang berpotensi melanggar prokes," ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur Jakarta, Anies Baswedan, Selasa lalu diperiksa penyidik Polda Metro Jaya untuk memberikan klarifikasi tentang kerumunan yang terjadi saat berlangsungnya acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan akad pernikahan putri Rizieq Shihab di Petamburan, Sabtu lalu.

M.S. Widodo

Tito Karnavian

DOK.GATRA/ DRIGO TOBING

FOTO-FOTO DOK. PEMPROV BANTERN

Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) dan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy.

Wahidin dan Andika Bangun Pemprov Banten Bebas Korupsi

Banyak perubahan revolusioner pada masa kepemimpinan Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) dan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy. Tidak hanya mengenai pembangunan infrastruktur, tetapi juga tata kelola keuangan yang terus membaik.

Paradigma Provinsi Banten termasuk daerah korup telah sirna. Akademisi Banten Ucu Juhroni menuturkan, kini paradigma wajah pengelolaan Pemerintah Provinsi Banten telah berubah total. Selama empat tahun berturut-turut, memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Sejak dilantik, Gubernur Wahidin Halim (WH) bertekad dan berkomitmen menertibkan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Ia berkomitmen mengubah mentalitas dan pola pikir pejabat serta staf untuk tidak mudah menerima suap.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pencegahan korupsi terintegrasi, terdapat delapan area intervensi yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP, manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah dan tata kelola dana desa, hasil progres berdasarkan hasil verifikasi tim Korsupgah KPK telah mencapai 93, atau berada pada urutan ke-3 secara nasional dari 34 provinsi se-Indonesia.

Bersinergi dengan Beberapa Sektor

Sikap optimisnya membuat WH-Andika dengan santai menyambut kedatangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Provinsi Banten. Mereka mendukung KPK dalam rangka menyosialisasikan program pencegahan korupsi.

Selain itu, Gubernur Banten juga meminta BPK RI agar turut mendampingi serta memperkuat basis tugas Inspektorat Pemprov Banten dalam melaksanakan fungsi pengawasan keuangan. Hasilnya, para pengusaha yang bekerja sama dengan Pemprov Banten tidak berani bermain-main dengan proyek pekerjaan di Banten. Kualitas pekerjaan mereka pun menjadi lebih baik.

"Saya sendiri sebagai gubernur, tidak pernah segan untuk mengecek langsung setiap pekerjaan ke lapangan," katanya.

Menyambut Anggaran Tahun 2021, WH meyakini pembangunan di Provinsi Banten bakal semakin maju, sesuai prosedur yang ditetapkan BPK dan KPK. Hingga sisa masa jabatannya berakhir, dia tetap berkomitmen dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Pembentukan Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi Provinsi Banten turut berperan membenahi tata kelola keuangan. Melibatkan pembuat kebijakan dan pelaku usaha di tingkat daerah, keberadaannya mendorong sikap profesional dan jujur.

Saat pembentukan KAD Banten dihadiri perwakilan Kadin Provinsi Banten, Kadin kabupaten/kota se Provinsi Banten, Apindo Provinsi Banten, Hipmi Provinsi Banten, Gapensi Provinsi Banten, GP Farmasi Provinsi Banten, Gapeksindo Provinsi Banten, Inkindo Provinsi Banten, dan REI Provinsi Banten. ●

Gubernur Banten Wahidin Halim meninjau proyek penambahan ruas jalan.

DOK.GATRA/RIFKI M. IRSYAD

Minuman beralkohol

RUU Minol Disambut Kegaduhan

Sejak dimasukkan dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020, Rancangan Undang-Undang Minuman Beralkohol (RUU Minol) mengundang pro dan kontra. Di parlemen, RUU ini didukung oleh 21 anggota PPP, dua anggota PKS, dan satu anggota Gerindra. Legislator PAN, dengan 44 anggota, juga sedang bersiap memberi dukungan.Adapun dua fraksi gemuk, PDI Perjuangan dan Golkar, mati-matian menolak.

Bagi partai pengusul, RUU ini akan mengatur tata kelola peredaran minuman beralkohol. Hal ini kemudian berdampak pada kejelasan hukum terkait produksi, distribusi, dan konsumsi minuman keras. “Terjadi kejelasan siapa yang boleh memproduksi, dengan kadar alkohol berapa itu produksi yang boleh dikonsumsi, dan siapa yang boleh membeli. Saya kira, ini cukup jelas tujuan dari dibuatnya peraturan perundang-undangan itu,” ujar Anggota Fraksi Gerindra, Muhammad Syafi’i.

Adapun Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno, menilai bahwa RUU ini tidak memenuhi unsur urgensi dan signifikansi. RUU Minol sebelumnya memang sudah masuk dalam daftar Prolegnas 2019, tetapi kemudian mandek di tengah jalan.

Dengan alasan ini, Hendrawan mendorong para pengusul agar membahas lebih dalam terkait isu pembahasan rancangan beleid ini. “Saya berharap, tim pengusul menarik *wisdom* dari pengalaman masa lalu untuk diinkorporasi dalam apa yang akan kita lakukan di masa depan,” ujarnya.

Para produsen arak lokal disebut sebagai satu di antara sejumlah pihak yang pendapatannya hilang jika beleid ini sampai disahkan. Setiap daerah memiliki ciri khas minuman keras lokal. Di Bali, misalnya, ada Desa Tribuana yang merupakan desa penghasil arak. Adapun di Sulawesi Utara, cap tikus yang merupakan arak lokal dan menjadi tumpuan beberapa UMKM, juga akan terdampak.

Hal ini menjadi perhatian Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Dalam keterangan tertulisnya, ICJR menganggap RUU ini menggunakan pendekatan yang sifatnya *prohibitionist* alias larangan buta. Dalam draf beleid ini, tiap orang dilarang memproduksi, memasukkan, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menjual minuman beralkohol di wilayah RI. Mereka yang melanggar pun dikenai sanksi pidana.

Aditya Kirana

Meski Pandemi, Pertamina Optimis Kinerja Positif

DOK. PERTAMINA

Pengeboran Sumur Proyek Jambaran-Tiung Biru (JTB)

PT Pertamina (Persero) memastikan investasi di proyek strategis yang dijalankan pada seluruh lini bisnis tetap berjalan untuk masa depan ketahanan dan kemandirian energi nasional. VP Corporate Communication Pertamina, Fajriyah Usman menjelaskan, kendati diterpa *triple shock* di masa pandemi COVID-19, Pertamina tetap optimistis capaian kinerja tetap positif pada akhir 2020.

Pertamina kata Fajriyah, tetap berkomitmen menjalankan proyek strategis yang bermanfaat untuk menjaga dan meningkatkan produksi migas dan produk energi nasional pada beberapa tahun ke depan. Beberapa proyek strategis di Hulu, seperti Proyek Jambaran-Tiung Biru yang dikelola PT Pertamina EP Cepu saat ini terus berjalan.

PT. Pertamina EP Cepu sebagai Anak Perusahaan Hulu (APH) saat ini telah berhasil menyelesaikan pemboran 5 sumur baru dan 1 sumur re-entry dan dilanjutkan uji produksi sumur dengan perforasi sepanjang lebih 800 ft single trip secara rigless dengan Smart Coiled Tubing Unit untuk 4 sumur di Jambaran East, hasil uji produksi yang dilakukan secara aman dengan laju produksi melebihi 60 MMSCFD, kandungan H2S hingga 8,000 ppm dan C02 mencapai 25%.

Selanjutnya uji produksi akan dilanjutkan untuk 2 sumur lainnya di Jambaran Central.

"Proyek ini akan memproduksi gas dari lapangan unitisasi Jambaran-Tiung Biru dengan target produksi rata-rata gas sebesar 315 MMSCFD dan target gas onstream pada tahun 2021," kata Fajriyah awal November lalu..

Selain itu, kegiatan di lepas pantai utara Jawa Barat yang dilakukan oleh PHE ONWJ terus berlangsung. Setelah selesai pengeboran sumur KLD-1, proyek pengembangan KLD ONWJ saat ini masuk pada tahap pengeboran sumur KLD-3. Proyek ini ditargetkan dapat berkontribusi dalam penambahan cadangan dan produksi pada Desember 2020.

> “Pertamina optimis sampai akhir tahun akan ada pergerakan positif sehingga diproyeksikan laba juga akan positif”
>
> **Fajriyah Usman**

Di sektor bisnis lainnya, tambah Fajriyah, Pertamina juga terus melanjutkan realisasi pada proyek pengembangan dan pembangunan kilang yang dikawal oleh PT Kilang Pertamina Internasional (KPI). Salah satunya adalah proyek RDMP Balikpapan yang merupakan salah satu proyek terbesar Pertamina dengan nilai mencapai kisaran US$6,5 miliar.

Proyek ini akan meningkatkan kapasitas kilang, memperbaiki kualitas produk dan menurunkan harga pokok produksi BBM, yang mendorong peningkatan devisa dan penerimaan pajak. "Saat ini proyek RDMP Balikpapan telah mencapai 22,62% sampai dengan akhir Oktober 2020, berjalan dengan protokol kesehatan yang ketat, disamping juga turut mendorong program pemulihan ekonomi karena menyerap lebih dari 5.000 tenaga kerja," jelasnya.

Selain itu, untuk memastikan tersedianya fasilitas penyimpanan dan distribusi yang handal di masa depan, Pertamina juga terus menjalankan proyek infrastruktur tangki timbun baik di Terminal BBM, Terminal LPG maupun di DPPU serta melakukan perawatan terhadap 280 kapal.

“Pandemi COVID-19, dampaknya sangat signifikan bagi Pertamina. Dengan penurunan demand, depresiasi rupiah, dan juga *crude price* yang berfluktuasi yang sangat tajam membuat kinerja keuangan sangat terdampak,” ujarnya.

“Namun, Pertamina optimis sampai akhir tahun akan ada pergerakan positif sehingga diproyeksikan laba juga akan positif, mengingat perlahan harga minyak dunia sudah mulai naik dan juga konsumsi BBM baik industri maupun retail juga semakin meningkat," ujar Fajriyah.

Sejalan dengan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), konsumsi BBM dalam negeri telah meningkat, dari sebelumnya diprediksikan penurunan 30 persen, kini penurunannya menjadi hanya sekitar 12 persen. “Peningkatan konsumsi BBM yang signifikan menunjukkan ekonomi nasional yang terus tumbuh di berbagai sektor, karena itu Pertamina optimis kinerja akhir 2020 tetap akan positif,” ujar Fajriyah.

Anies Baswedan (kiri) bersama Jusuf Kalla (kedua kanan)

ANTARA FOTO/HO/AMA

SENTAKAN POLITIS POROS BARU

KEPULANGAN RIZIEQ SHIHAB POTENSIAL MENGUBAH LANSKAP PETA PERPOLITIKAN DALAM NEGERI. AKAN TERBENTUK POROS RIZIEQ-JK-ANIES ?

Kepulangan Muhammad Rizieq Shihab ke Tanah Air disambut gegap gempita para pengikutnya. Jalur Cengkareng hingga Petamburan dipadati ribuan massa. Kehadiran mereka seakan mengungkap kerinduan pada sosok yang lekat dengan organisasi masyarakat Front Pembela Islam (FPI) tersebut.

Sesampainya di kediaman, gelombang penyambutan belum selesai. Tokoh politik hingga pejabat tinggi bergantian menyambangi Rizieq, seolah tidak mau ketinggalan momen penyambutan sang Imam Besar.

Mantan Ketua MPR dan Pendiri Partai Ummat, Amien Rais, Deklarator KAMI Marwan Batubara, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri, politisi Partai Gerindra Fadli Zon, hingga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan adalah nama-nama besar yang datang ke Petamburan. Tak pelak, pemandangan tersebut menimbulkan asumsi di publik bahwa kedatangan Habib Rizieq Shihab (HRS) akan berdampak besar pada peta perpolitikan dalam negeri.

Salah satu deklarator KAMI, Refly Harun, tidak yakin bahwa kunjungan Marwan Batubara ke kediaman HRS merupakan penugasan dari KAMI. Namun, ia tidak menampik bahwa kehadiran sosok HRS bisa memperkuat konsiliasi oposisi yang berada di luar sistem. “Pengertian oposisi ini jangan dibayangkan seperti orang mau memberontak. Ini lebih kepada apa yang disebut *social control*,” kata Refly kepada M. Almer Sidqi dari GATRA, Selasa lalu.

Ia menerangkan, oposisi yang berada di dalam parlemen disebut sebagai *political control*. Sementara itu, dinamika yang terjadi saat ini adalah fakta bahwa *political control* tidak berjalan dengan semestinya. Maka, ada kekuatan sosial atau kekuatan masyarakat yang menggerakkan *social control* di luar parlemen. “Jadi, tidak ada kaitannya jika disebut KAMI akan berkoalisi dengan HRS, karena *social control* itu bisa

dimainkan siapa saja. Semakin kuat akan semakin baik karena akan diperhitungkan oleh pemerintah," ia menjelaskan.

Sementara itu, Presidium KAMI, Din Syamsuddin, mengatakan bahwa KAMI sebagai gerakan politik moral bisa berkoalisi dengan siapa pun, utamanya yang sepaham. Din menjelaskan secara singkat bahwa kepulangan HRS mungkin saja bisa menjadikan "gerakan oposisi" sebagai kekuatan politik yang kuat atau sebagai poros politik baru.

"Dan hal itu akan terjadi jika ada koalisi di antara berbagai kekuatan. Indonesia yang majemuk meniscayakan koalisi, sukar bila hanya dilakukan oleh satu-dua kelompok," ujarnya.

Bukan hanya soal koalisi-oposisi, kepulangan HRS juga dilihat sebagai persiapan menuju kontestasi pilkada 2022 dan pilpres 2024. Di titik ini, nama mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) ikut terseret.

Adalah Ferdinand Hutahaean, mantan politisi Partai Demokrat, yang memunculkan isu ini ke publik. Meski, ia menolak mengakui bahwa cerita yang dia lempar di twitter itu berkaitan dengan JK dan Anies Baswedan.

Bukan hanya soal koalisi-oposisi, kepulangan HRS juga dilihat sebagai persiapan menuju kontestasi Pilkada 2022 dan Pilpres 2024. Di titik ini, nama mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) ikut terseret.

"Karena tidak mungkin dibarengi dengan bukti autentik, itu kan akan jadi masalah secara hukum. sehingga saya harus menggunakan kata pengganti, dan saya tidak pernah menyebut Caplin itu Pak JK, Bus Edan itu Anies Baswedan, ini siapa, itu siapa, saya kan tidak pernah menyebut. Itu kan persepsi publik yang mengarah ke sana," ujar Ferdinand kepada Ryan Puspa Bangsa dari GATRA.

Sebelumnya, di akun Twitter @*FerdinandHaean3*, Ferdinand menggunakan tiga istilah untuk menyamarkan nama tokoh, yakni Caplin, Presiden, dan Si Asu Pemilik Bus Edan.

"Hebat juga si Caplin, bawa duit sekoper ke Arab, bayar ini itu beres semua. Agenda politik 2022 menuju 2024 sudah dipanasi lebih awal," cuit Ferdinand pada Rabu, 4 November lalu. "Tampaknya Presiden akan sangat disibukkan oleh kegaduhan rekayasa Caplin demi anak emasnya si asu pemilik bus edan."

Kepada GATRA, Ferdinand mengaku bahwa info tersebut didapatnya dari temannya di dalam maupun di luar negeri. "Nanti semakin riuh. Tidak perlu lah saya sebut, yang penting bahwa saya punya banyak teman di dalam negeri maupun di luar negeri. Teman-teman saya ini juga orang-orang yang punya sumber informasi," kilahnya.

Muhammad Jusuf Kalla melalui juru bicaranya, Husein Abdullah, menolak mentah-mentah tudingan bahwa dirinya membantu proses kepulangan HRS. Husein bilang, dua minggu yang lalu, JK memang sempat datang berkunjung ke Riyadh dan Makkah. Namun, maksud kunjungannya bukan dalam rangka bertemu dengan HRS, melainkan untuk menyaksikan penandatanganan museum Rasulullah yang akan segera dibangun di Jakarta.

"Agendanya bertemu Liga Muslim Dunia yang menjadi sponsor atau yang mewadahi pembangunan museum. Ini misi yang sangat suci, dari Vatikan, Riyadh, Makkah, lalu balik Tanah Air. Itu dua-tiga hari," Husein menjelaskan kepada GATRA, Senin lalu.

Selepas bertemu dengan tokoh-

ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO A

Refly Harun

tokoh muslim dunia dan menyaksikan penandatanganan museum Rasulullah, JK langsung bertolak ke Makkah untuk menjalankan ibadah umrah. Lebih lanjut Husein menjelaskan, sebelum bertandang ke Makkah dan Riyadh, JK sebelumnya melakukan perjalanan ke Vatikan untuk menjalankan misi kemanusiaan.

Di sana, pengusaha kawakan itu bertemu dengan pemimpin Gereja Katolik Paus Fransiskus dan beberapa tokoh agama lainnya untuk membahas mengenai penghargaan kemanusiaan. Biasanya, pembicaraan tersebut dilakukan secara virtual. Namun, dengan beberapa pertimbangan kali itu pembicaraan dilakukan secara tatap muka.

Karena itulah Husein kemudian menekankan, dalam waktu singkat itu, tujuan perjalanan JK dari Vatikan, menuju Riyadh, Makkah, hingga kembali lagi ke Tanah Air sangat jelas. Sehingga, tidak benar apabila ada pihak yang menuding kepergian JK ke Tanah Suci itu untuk bertemu HRS dan bermaksud untuk membantu kepulangannya ke Indonesia.

Begitu juga dengan tuduhan yang mengatakan, bahwa JK pergi ke Makkah dengan membawa satu koper penuh berisi uang. Sebab, dengan membawa uang sebanyak itu, proses perjalanan JK akan relatif lebih lama, lantaran harus melewati beberapa prosedur pemeriksaan terlebih dulu di bandara. “Kalau ceritanya bawa duit sekoper, kita harus bikin *report* dulu. Dicatat. Itu enggak mungkin,” Husein menegaskan.

Menanggapi potensi adanya dukungan mantan Wapres Jusuf Kalla di kubu HRS, peneliti politik LSI, Djajadi Hanan, menilai bahwa jika itu memang benar, maka hal itu akan menjadi dorongan signifikan bagi calon yang diusung tersebut. Hal itu karena JK memang merupakan tokoh yang masih berpengaruh di Indonesia. Selain karena JK punya ketokohan, JK dikenal sebagai pemimpin di kalangan Islam.

“Kalau bicara kedekatan, JK dan Anies itu memang keduanya sudah dekat sejak lama. Beliau berdua juga semakin dekat ketika Pak Anies menjadi Juru Bicara Kampanye Pak Jokowi-JK. Jadi, saya kira wajar saja

DISTRIBUSI PENYEBUTAN ANIES DI MEDIA
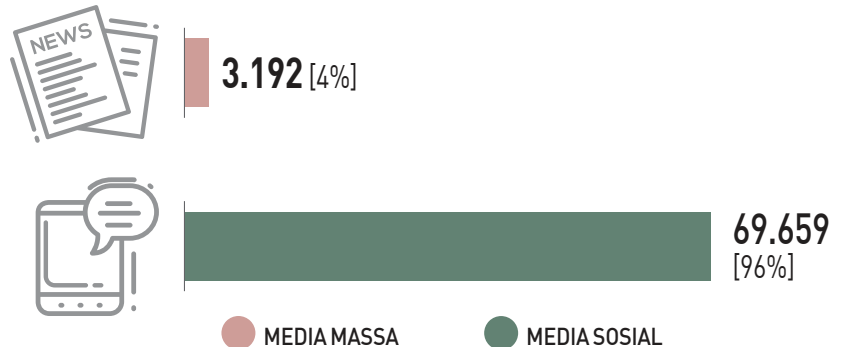
TOTAL PENYEBUTAN ANIES DI MEDIA ONLINE
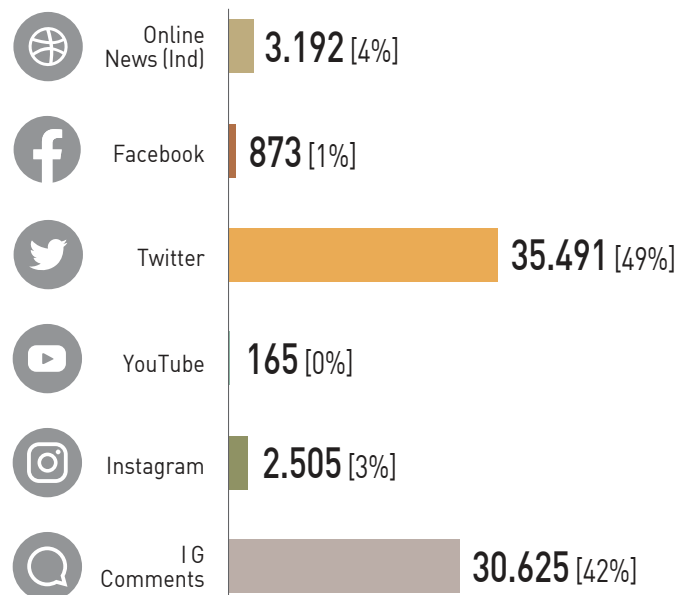
Sumber: LP3ES

SENTIMEN PENYEBUTAN ANIES

jika memang Pak JK ada keinginan untuk mendukung Anies," katanya.

Keakraban Anies dan JK disebut-sebut sudah terjalin sejak Anies menduduki jabatan rektor Universitas Paramadina, 2007 silam. JK juga disebut sebagai sosok yang menyokong Anies kala mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai jika ternyata ada kebenaran dari isu yang beredar soal adanya hubungan politis antara kepulangan HRS dengan sosok Jusuf Kalla, dan hal itu yang ditengarai bisa menjungkirbalikkan lanskap politik Indonesia.

"Bagaimanapun, JK adalah simbol kekuatan elite, kelas menengah atas menjadi ruang pengaruh JK, sementara di tingkat penggerak massa ada HRS. Dua kolaborasi ini bisa menjadi sentakan politis, karena dua tokoh ini dikenal berbeda iklim," Dedi membeberkan.

Jika menilik dari konsistensi HRS dalam menunjukkan sikap, dalam pandangan Dedi, dukungan akan diberikan pada sosok yang berseberangan dengan pemerintahan. Pilihan paling besar, dukungan ini akan mengarah ke kelompok oposisi seperti Anies Baswedan dan KAMI serta afiliasinya.

"Sejauh ini, Anies adalah yang paling dekat, dan rasional, karena Anies terhitung paling banyak memberikan dukungan pada aktivitas HRS dan akomodatif," katanya.

Dukungan yang diberikan pada sosok Gubernur DKI tersebut akan makin terealisasi jika memang ada sosok JK di balik racikan strategi pendorongan Anies di 2024. Hal itu ditengarai karena JK memang merupakan sosok yang dekat dan mengagumi Anies Baswedan.

"Relasi Anies-JK tidak saja dekat secara politik, lebih dari itu keduanya sesama tokoh berpengaruh HMI, dengan relasi ini tentu lebih mudah mengakomodasi kepentingan politik, terlebih jika memang Anies adalah sosok yang mapan secara intelektual dan kepemimpinan," katanya.

Dalam sebuah perbincangan dengan GATRA pada akhir tahun 2018, HRS menyatakan jika dia akan memberikan dukungan politiknya kepada Anies Baswedan. Hal itu dilakukan karena dirinya telah mencabut dukungan dari Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

Sinyal akan adanya koalisi makin kuat setelah FPI melalui akun Twitter resminya, Rabu lalu, menulis tagar *#Anies4PresidenRI2024* mengiringi unggahan foto Anies yang dipadu

TOTAL PENYEBUTAN BERDASARKAN MEDIA

[20-27 OKT 2020]

ANIES BASWEDAN
42.386
35.629

RIDWAN KAMIL
17.317
12.243

GANJAR PRANOWO
24.774
21.789

TRI RISMAHARINI
11.616
10.213

PRABOWO SUBIANTO
16.894
10.556

ONLINE NEWS (IND) • TWITTER • FACEBOOK • INSTAGRAM • YOUTUBE

TWITTER

Sumber: LP3ES

"Kalau bicara kedekatan, JK dan Anies itu memang keduanya sudah dekat sejak lama. Beliau berdua juga semakin dekat ketika Pak Anies menjadi juru bicara kampanye Pak Jokowi-JK. Jadi, saya kira wajar saja jika memang pak JK ada keinginan untuk mendukung Anies."

Djajadi Hanan

ELEKTABILITAS

Indonesia Political Opinion

Indikator Politik Indonesia

RELASI ANIES-JUSUF KALLA

- ☑ Sama-sama ada di dalam naungan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
- ☑ Anies disebut menjabat sebagai rektor berkat pertolongan JK.
- ☑ JK disebut mendukung Anies saat mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta.
- ☑ JK kerap mengkritik penanganan Covid-19 pemerintah pusat dan terlihat lebih condong mendukung kebijakan Gubernur DKI Jakarta.

(Berbagai sumber, diolah)

dengan kutipan surah *Al-Insyirah* lengkap dengan delapan ayat dan terjemahannya.

Pengamat politik dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Sirojudin Abbas, berpandangan HRS sangat mungkin akan berperan lagi sebagai juru kampanye untuk Anies Baswedan. Menurutnya, Rizieq tidak memiliki senjata politik lain selain politik SARA serta gerombolan FPI dan 212 untuk menyerang lawan-lawan politiknya.

Sehingga besar kemungkinan senjata yang sama akan digunakan kembali pada kontestasi berikutnya. "Tapi kali ini pengaruh dia tidak akan sebesar tahun 2016/2017. Terutama jika tidak ada lawan yang memiliki perbedaan terlalu kontras seperti Ahok," Abbas menjelaskan kepada Wahyu Wachid Anshory dari GATRA.

Abbas menambahkan, dengan masa pemerintahan Jokowi yang akan berakhir, politisi senior seperti Megawati, Jusuf Kalla, SBY, dan Prabowo pasti akan sangat cermat dan hati-hati dalam memutuskan dukungan. "Tentu sekarang adalah waktunya untuk beliau (JK) menjadi *king maker*. Apakah akan tetap dukung Anies seperti pilkada DKI 2017? Bisa ya, bisa tidak. Tergantung seberapa besar potensi keterpilihannya dan siapa lawan yang akan dihadapinya.

> **"Tentu sekarang adalah waktunya untuk beliau [JK] menjadi *king maker*. Apakah akan tetap dukung Anies seperti pilkada DKI 2017? Bisa ya, bisa tidak."**
>
> Sirojudin Abbas

Saat ini belum kelihatan. Terlalu awal. Masih mungkin ada tokoh-tokoh baru yang muncul dalam dua-tiga tahun ke depan," katanya.

Wartawan GATRA Dwi Reka Barokah mencoba mengonfirmasi langsung kepada Anies Baswedan tentang pertemuannya dengan HRS. Pertanyaan diajukan saat Anies mendatangi Polda Metro Jaya, Selasa lalu, Namun, Anies hanya menanggapi pertanyaan awak media yang menanyakan perihal pemanggilan tersebut sambil bergegas pergi.

Sehari sebelumnya pun, usai melakukan pertemuan dengan pimpinan DPRD DKI, saat dikonfirmasi apakah pertemuan dirinya dengan HRS dilakukan dengan tujuan meminta dukungan politis, Anies tak menjawab. Ia hanya tersenyum lalu mengacungkan jempol sambil bergegas masuk lift dan meninggalkan ruang pimpinan DPRD.

HIDAYAT ADHININGRAT P., UCHA JULISTIAN MONE, DAN QONITA AZZAHRA

ANIES PERLU KENDARAAN

KEDATANGAN MUHAMMAD RIZIEQ SHIHAB DINILAI MEMBERI ANGIN SEGAR BAGI ANIES BASWEDAN UNTUK MELEMPANGKAN PELUANGNYA MENUJU KONTESTASI PILPRES 2024. TIDAK ADA JAMINAN AKAN DITERIMA OLEH PARTAI-PARTAI ISLAM, ANIES MASIH PERLU MENGKALKULASI DUKUNGAN DARI PARPOL LAIN.

Anies Baswedan punya cara sendiri "menyambut" kepulangan Muhammad Rizieq Shihab ke Tanah Air. Selasa, 10 November 2020, beberapa jam setelah pesawat Saudi Arabia Airlines dengan nomor penerbangan SV 816 yang membawa Rizieq dari Arab Saudi mendarat di bandara Soekarno-Hatta, Gubernur DKI Jakarta itu langsung mengunjungi Rizieq di kediamannya di Petamburan, Jakarta Barat. Saat Anies datang malam hari, suasana sekitar Petamburan masih ramai oleh massa pendukung Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) tersebut.

Belakangan, banyak kritik dilayangkan kepada mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu terkait kunjungannya. Ia seakan mengafirmasi kerumunan massa yang mengabaikan prosedur kesehatan di tengah pandemi Covid-19. Di sisi lain, Rizieq Shihab merupakan salah seorang tokoh yang mendukungnya habis-habisan pada pilkada DKI 2017.

Bukan hanya Anies yang "merayakan" kepulangan Rizieq dan melepas rindu. Ada juga Ahmad Syaikhu, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Amien Rais yang baru saja mendeklarasikan Partai Ummat. Rizieq menjadi magnet ba-

Iring-iringan Habib Rizieq Shihab melintas di ruas Jalan Letjen S. Parman, Jakarta

POLITIK

gi beberapa politisi Islam untuk berkumpul, setidaknya mereka yang menolak bergabung di pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Pertemuan Rizieq dan Anies tentu membawa pesan politik tersendiri, apalagi jika ditambah Syaikhu dan Amien Rais, spekulasi politik makin menjadi-jadi. Tentu bukan tanpa alasan jika publik melihat kongko-kongko mereka menjadi sangat politis dan dituding mengeliminasi alasan silaturahmi yang amat normatif.

Ketika ditanya soal prospek dukungan politik Rizieq terhadapnya menuju kontestasi pilpres 2024, Anies mengelak. "Enggak ada, enggak ada apa-apa kemarin," ujarnya kepada wartawan ketika menemui Ketua DPRD DKI Jakarta pada Senin, 16 November 2020.

GATRA/ADI WIJAYA

Adapun Anggota Fraksi Gerindra di DPRD DKI Jakarta, Syarif, juga menolak jika perbincangan Anies dan Rizieq sarat dengan kepentingan politik 2024. "Masih kepagian," katanya.

Namun politik tidak pernah tidur, dan tidak ada yang terlalu pagi untuk politik. Anies, jika dirunut dari beberapa hasil sigi, menjadi salah satu dari beberapa nama yang memiliki nilai elektoral paling kuat.Indikator Politik Indonesia, misalnya, melihat posisi Anies cukup signifikan sebagai calon presiden 2024. Dalam sigi yang dilakukan pada 24-30 September 2020, elektabilitas Anies menduduki posisi ketiga dengan 14,4%, di bawah Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto.

Beberapa survei lain yang digelar sepanjang tahun ini juga memperlihatkan posisi elektabilitas Anies dalam daftar lima teratas. Tentu saja modal elektabilitas yang oke dan relatif konsisten itu baru punya arti jika Anies didukung kendaraan politik yang cukup kencang dan lolos ambang batas presiden.

Hasil sigi Indikator Politik Indonesia ini sebenarnya sudah dibaca partai politik terlebih dahulu. Partai Nasdem, misalnya, yang jauh-jauh hari sudah mengelus Anies pada pertemuannya dengan Surya Paloh. Kala itu, Paloh sudah ancang-

ancang, Anies bisa menjadi capres dari Nasdem dengan beberapa syarat.

Partai lain yang memungkinkan mendukung Anies sebagai capres adalah PKS. Sebagai salah satu partai pengusung di pilkada DKI Jakarta, PKS tetap kokoh mendukung Anies meski posisi Wakil Gubernur diberikan kepada Ahmad Riza Patria, politisi Gerindra.

Meski beberapa waktu ke belakang, fraksi PKS di DPRD DKI lebih leluasa mengkritik. Misalnya, ketika Anies berencana membuka bioskop ketika pandemi belum teratasi. Anggota Fraksi PKS, Achmad Yani, mengatakan bahwa kebijakan pembukaan bioskop masih belum tepat. "Kami juga tidak pernah diajak diskusi," ujar Yani.

Namun PKS sudah menyalakan lampu hijau jika Anies berniat maju empat tahun mendatang. Salah satu Ketua DPP PKS, Mardani Ali seorang inisiator Partai Ummat, Nazarudin, mengatakan bahwa sikap Amien Rais dan Rizieq Shihab sejalan jika bicara soal oposisi terhadap rezim Jokowi. Nazar menyebut Rizieq telah menjadi ikon bagi pendukungnya. Untuk itu, Partai Ummat siap bersinergi. "Agar perjuangan terarah," katanya.

Tentunya, Amien Rais terus menjalin komunikasi serius dengan

DOK.HUMAS MPR

magnet bagi pemilih muslim. Hal ini kemudian menjadikannya komoditas politik. Bagi pengamat politik UIN Jakarta, Adi Prayitno, dengan segala tindakan dan ucapannya, Rizieq tentu menjadi bahan pembicaraan publik, meski tetap menghadirkan pro dan kontra.

Kepulangan Rizieq tentu menguatkan konsolidasi kelompok anti-pemerintah. Buktinya, kata Adi, beberapa politisi datang ke Petamburan. Nah, konsolidasi ini bukan hanya perkara perjuangan umat semata, melainkan persiapan menuju kontestasi politik elektoral.

Pada prinsipnya, politik kubu atau mazhab akan tetap menyatu dalam pertarungan politik, apalagi politik elektoral. Revisi UU Pemilu memang masih dibahas di DPR. Jika hasilnya nanti pilkada 2022-2023 tidak digabungkan dengan pemilu serentak nasional 2024, bagi Adi, kontestasi

"PPP dan PAN tidak mendukung Anies pada putaran pertama Pilkada DKI 2017, baru putaran kedua mendukung. Apalagi PKB yang memiliki irisan politik agama yang berbeda dengan Anies."

Adi Prayitno

Sera, mengatakan bahwa Anies bisa mendapat dukungan bulat PKS selama mampu mengemban jabatan Gubernur. Adapun Presiden PKS, Ahmad Syaikhu, menghindar pertanyaan soal peluang investasi politiknya kepada Anies pasca kepulangan Rizieq. "Kita fokus konsolidasi pilkada serentak *dulu*," ujarnya.

Bahkan partai baru dengan modal elektoral masih nol, seperti Partai Ummat, masih pikir-pikir untuk mengajukan nama Anies. Salah semua elemen, termasuk kolaborasi dengan pihak yang selama ini dianggap memiliki kesamaan visi. "Habib Rizieq jelas agendanya banyak kesamaan [dengan Partai Ummat] secara sosial, politik. [Pada] 2024 nanti kita lihat, Habib Rizieq, atau Anies, atau Gatot, atau yang lain, yang akan direspons umat," ucap Nazar.

***

Rizieq kerap dielu-elukan sebagai orator ulung yang menjadi pilkada DKI Jakarta 2022 akan menjadi pembuktian sekaligus ujian kerja sama Rizieq dengan Anies, seperti yang terjadi pada pilkada DKI 2017.

"Problemnya, UU Pilkada kita belum diganti. Dalam aturannya disebutkan tahun 2022 dan 2023 tidak ada pilkada serentak, *tapi* yang jelas ada tidak ada pilkada, Rizieq, Anies, Amien, Hidayat Nur Wahid, adalah tokoh-tokoh yang memang mengambil jarak dengan pemerintah," tutur Adi kepada

Wahyu Wachid Anshory dari GATRA.

Dalam politik elektoral, ada asosiasi citra yang kental. Kali ini, Anies dicitrakan sebagai figur di luar pemerintah. Ada beberapa calon yang dicitrakan calon dari dalam pemerintahan, seperti Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, hingga Sandiaga Uno.Variasi ini sudah bisa terlihat sejak saat ini, meski memang tidak ada jaminan mutlak bahwa Anies bisa diterima oleh semua partai Islam. Hal ini terlihat dari peta dukungan partai Islam di pilkada DKI Jakarta. "PPP dan PAN tidak mendukung Anies pada putaran pertama pilkada DKI 2017, baru putaran kedua mendukung. Apalagi PKB yang memiliki irisan politik agama yang berbeda dengan Anies," Adi mengungkapkan.

Namun,tidak ada hitam dan putih yang kekal dalam politik. Bisa jadi, demi kepentingan elektoralnya, para parpol membentuk kongsi-kongsi baru. Ini kemudian bergantung pada negosiasi kepentingan. Idealnya, semua parpol Islam bersatu di bawah Anies. "*Tapi* problemnya, kunut tidak kunut menjadi pilihan yang ekstrem. Polarisasi keagamaan ini berimplikasi pada partai-partai Islam yang sering kali tidak ketemu," ujar Adi.

Belum lagi dengan PKS, yang menurut Adi agak sulit untuk merangkul kekuatan politik Islam lain. Ke depan, hanya kekuatan figur yang bisa menyatukan parpol, dan Anies pun masih diragukan kapasitasnya untuk berpolitik lebih cair serta meraup dukungan parpol sebanyak mungkin.

Persoalan lainnya, yaitu regulasi yang masih mengambang. Ketika UU Pilkada sudah beres dan menentukan bahwa DKI Jakarta melaksanakan pilkada pada 2022, maka Anies besar kemungkinan tetap maju sebagai petahana. Jika menang, maka modal politik Anies makin besar untuk bertarung pada pilpres 2024.

Namun lagi-lagi Anies masih perlu menghitung semua faktor, karena bukan hanya Rizieq yang menentukan kemenangan Anies. Jika Rizieq memiliki faktor massa dengan pameran lautan massa di Monas pada agenda 411 dan 212, tidak semuanya bisa disimplifikasikan sebagai warga Jakarta. Begitu juga dengan massa yang menyambut kedatangan Rizieq di bandara.

Tantangan Anies adalah mengapitalisasi dukungan dalam bentuk suara. Ini bisa didapat dari parpol dan organisasi di luar konteks keagamaan.

SIMULASI JIKA ANIES DIDUKUNG

PARTAI OPOSISI:
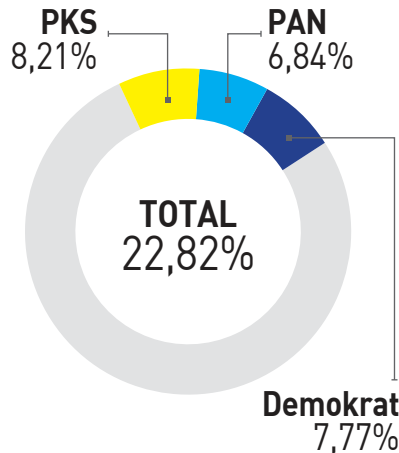
SEMUA PARTAI BASIS MASSA ISLAM:
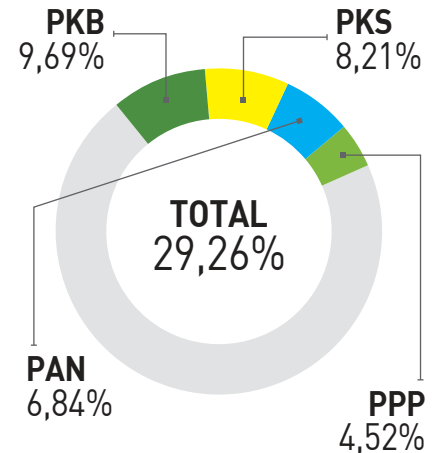
PDIP DAN PKS:
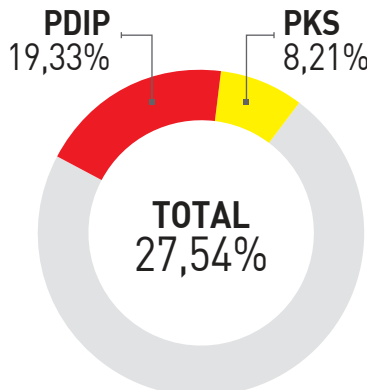
NASDEM DAN PKS:
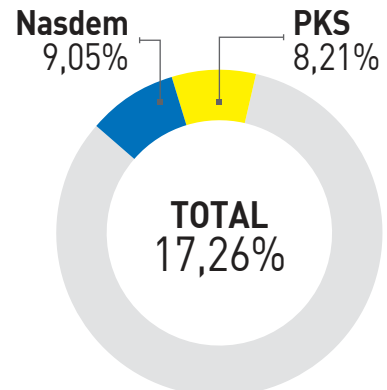
Angka dihitung berdasarkan persentase suara Pemilu Legislatif 2019

"Kalau HRS dianggap dominan, tidak perlu capek-capek dukung Anies. Maju saja jadi calon independen perseorangan," kata Adi.

Kenyataan bahwa Anies Baswedan, yang hingga saat ini terhitung sebagai capres potensial, sebenarnya bisa membuat parpol lain melirik. Director Center for Media and Democracy LP3ES, Wijayanto, mengatakan bahwa memang tak ada yang mustahil di dalam politik. "Anies ini adalah calon kuat untuk presiden, dan kita juga tahu bahwa berbagai survei juga menunjukkan bahwa Anies ini adalah salah satu calon yang paling kuat," ucapnya kepada M. Guruh Nuary dari GATRA.

PETA DUKUNGAN ANIES DI PILKADA 2017
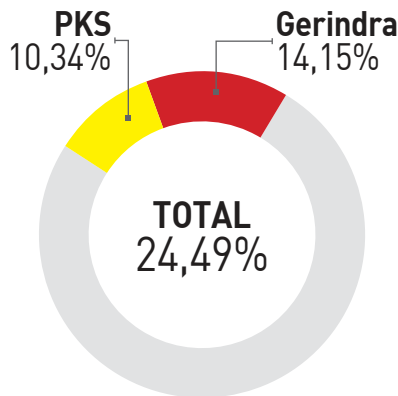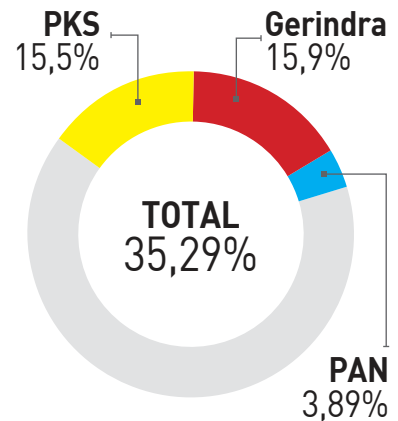
Angka dihitung berdasarkan Suara Hasil Pemilu Legislatif 2014 di DKI Jakarta

"Bagi Megawati, akan lebih masuk akal untuk menjadikan Anies dengan Puan, daripada mencapreskan Ganjar-Puan karena sama-sama dari PDI Perjuangan."

Wijayanto

Dari data yang dimiliki LP3ES, Anies terlihat paling populer pada pemberitaan daring dan media sosial. Popularitas Anies jauh mengalahkan Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, dan tokoh politik lainnya."Meskipun dengan catatan bahwa popularitas Anies itu dalam hal cuitan di media sosial. Namun dia juga paling banyak dicitrakan negatif, karena Jakarta menjadi sorotan ketimbang daerah lain," ujarnya.

Dalam media sosial, apa pun perbincangan politiknya, negatif maupun positif, tetap akan menguntungkan pihak yang menjadi bahan obrolan, karena membuatnya makin populer. "Jadi, volume percakapan terkait Anies bisa menjadi aset ke depan. Bisa menjadikannya sebagai *top of mind*," ucap Wijayanto.

Potensi ini, bagi Wijayanto, tidak hanya bisa digunakan sebagai petahana di pilkada DKI Jakarta 2022 (jika Undang-Undang dapat mengakomodasi), tetapi juga pilpres 2024. Terlebih, dengan popularitas ini, Anies bisa saja menjadi properti politik panas yang diincar banyak parpol.

Wijayanto menambahkan, masih terbuka kemungkinan Anies akan dilirik partai penguasa, seperti PDI Perjuangan. Bukan tidak mungkin pula Anies ditempatkan sebagai capres dan Puan Maharani sebagai wakilnya. "Bagi Megawati, akan lebih masuk akal untuk menjadikan Anies dengan Puan, daripada mencapreskan Ganjar-Puan karena sama-sama dari PDI Perjuangan," katanya.

Bagi Wijayanto, PDI Perjuangan perlu menjalankan politik dinasti. Begitu juga dengan oligarki di partainya. Jika Megawati ingin Puan berada dalam kekuasaan, tentu perlu mempertimbangkan posisi elektoralnya yang masih tercecer jauh dibanding tokoh-tokoh dalam daftar tiga besar yang lebih sering ditempati Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan.

Oleh karena itu, posisi Puan sebagai kandidat cawapres lebih memungkinkan. Jika disandingkan dengan tiga tokoh dengan capaian elektabilitas yang konsisten tadi, pilihan objektifnya ada pada Anies dan Prabowo. "Dengan skenario itu, Anies bisa jadi salah satu pilihan PDI Perjuangan," ujar Wijayanto.

ADITYA KIRANA
DAN ARIF KOES HERNAWAN (YOGYAKARTA)

Dalam rangka menyambut HUT ke-26 GATRA
Dapatkan tambahan diskon 26%

DISC. 15% +26%

6 BULAN

HARGA NORMAL **Rp 1.105.000**

CUKUP BAYAR

RP 651.950

HARGA NORMAL **Rp 2.210.000**

CUKUP BAYAR

RP 1.193.400

1 TAHUN

DISC. 20% +26%

DISC. 25% +26%

2 TAHUN

HARGA NORMAL **Rp 4.420.000**

CUKUP BAYAR

RP 2.165.800

Luar kota ditambah ongkos kirim

Sampai dengan akhir November 2020

FORMULIR BERLANGGANAN MAJALAH BERITA MINGGUAN

Mohon diisi dengan huruf cetak

DATA PELANGGAN

Nama Pelanggan : ____________ Tgl Lahir : ____________

Alamat Pengiriman : ☐ Rumah ☐ Kantor

: ______________________________

____

Telp. Rumah : ____________ Telp. Kantor : ____________

HP : ____________

E-mail : ____________

No. Fax : ____________

Hormat Saya

( )

CARA PEMBAYARAN

BCA Cab. Sudirman ACC. **035.300040.1**
Mandiri Cab Kalibata ACC. **126.000.4083.746**
BNI 1946 CAB Thamrin : **000 – 00562-70**
A/n PT. Era Media Informasi
(Mohon bukti transfer difax & dilampirkan)
Untuk keterangan lebih lanjut hubungi Layanan Pelanggan :
Telp. (021) 7973535
Direct : 081288002822 (Puspita) E-mail : puspita@gatra.com

RIZIEQ DATANG KAPOLDA MERIANG

BUNTUT PEMBIARAN KERUMUNAN PASCA HRS PULANG KE INDONESIA, KAPOLRI MENCOPOT DUA KAPOLDA DAN DUA KAPOLRES. GUBERNUR DKI JAKARTA IKUT KENA GETAHNYA.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan usai memenuhi panggilan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta

Gelaran kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan pernikahan putri Muhammad Rizieq Shihab, Najwa Shihab, di kediamannya, kawasan Petamburan, Jakarta Pusat, pada Sabtu pekan lalu berbuntut panjang. Kapolri Jenderal Idham Azis mencopot dua Kapolda, yakni Kapolda Metro Jaya, Irjen Polisi Nana Sudjana dan Kapolda Jawa Barat, Irjen Rudi Sufahradi. Keduanya dianggap tak bisa menegakkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19, sehingga membiarkan kerumunan terjadi di daerah DKI Jakarta dan Jawa Barat.

Pencopotan itu tertuang dalam Surat Telegram (ST) Kapolri Nomor 3222/XI/KEP./2020 tanggal 16 November 2020 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polri. Argo menyebut Irjen Polisi Nana Sudjana diberi jabatan baru sebagai Kors Ahli Kapolri. Irjen Muhammad Fadil Imran, yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Jawa Timur, ditunjuk untuk mengisi jabatan sebagai Kapolda Metro Jaya. Sementara itu, Irjen Rudi Sufahradi digeser menjadi Widekswara Tingkat Satu Lemdiklat Polri. Penggantinya adalah Irjen Ahmad Dofiri, yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Logistik Kapolri.

Tidak hanya dua Kapolda yang dibikin "meriang" akibat terdampak kedatangan Riziq Shihab. Idham Azis juga mencopot Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Polisi Heru Novianto dan Kapolres Bogor AKBP Roland Ronaldy. Heru dipindahkan ke Analisis Kebijakan (Anjak) Madya Bidang Brigade Mobil Korbrimob Polri. Penggantinya adalah Kombes Polisi Hengky Haryadi, yang sebelumnya menjabat sebagai Anjak Madya Pideksus Bareskrim Polri. Sementara itu, Roland dipindahkan ke Wadirreskrimsus Polda Jawa Barat. Jabatan baru Kapolres Bogor akan diisi oleh AKBP Harun, yang sebelumnya memegang posisi Kapolres Lamongan.

Beberapa kegiatan yang mengakibatkan kerumunan yang menjadi sorotan dan kritikan adalah saat massa Front Pembela Islam (FPI) yang berkumpul di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, untuk menjemput Rizieq Shihab dari Arab Saudi. Setelah itu, Rizieq menyelenggarakan dua kegiatan di kediamannya. Rizieq juga diketahui menghadiri acara di Megamendung, Kabupaten Bogor, yang juga dihadiri banyak massa.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, juga kena getahnya. Dia diperiksa hampir 10 jam di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya pada Selasa, 17 November lalu. Pemeriksaan itu terkait dugaan pelanggaran penegakan protokol kesehatan Covid-19 yang terjadi di wilayah DKI Jakarta setelah kepulangan Rizieq Shihab.

Anies mengaku dicecar dengan 33 pertanyaan oleh penyidik. Ia menyebut semua proses berjalan dengan baik dan ia menjawab pertanyaan penyidik sesuai fakta yang ada. "*Alhamdulillah*, saya tadi sudah selesai memenuhi undangan untuk memberikan klarifikasi dan prosesnya berjalan

GATRA/ADI WIJAYA

dengan baik," kata Anies di Mapolda Metro Jaya seusai pemeriksaan.

Namun, eks Menteri Pendidikan ini enggan membeberkan detail pertanyaan atau topik pemeriksaan secara keseluruhan. "Adapun detail isi pertanyaan, klarifikasi, dan lain-lain biar nanti menjadi bagian dari pihak Polda Metro Jaya untuk nanti meneruskan dan menyampaikan sesuai kebutuhan," ujar Anies.

Pemanggilan Anies itu berdasarkan laporan bernomor LI/279/XI/2020/PMJ/Ditreskrimum, 15 November 2020. Dasar dugaan tindak pidana yang dikenakan yakni tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan menghalang-halangi penyelenggara kekarantinaan kesehatan, sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Adapun kerumunan yang dibiarkan itu adalah ketika massa Front Pembela Islam (FPI) menggelar acara di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat.

Pasca kepulangannya, HRS mendapat sambutan masif dari para pendukungnya. Belum genap sepekan HRS menetap kembali di Indonesia,

"Pemerintah pasti sebenarnya kaget pada sambutan terhadap HRS yang sedemikian besar itu."

Refly Harun

beberapa peristiwa lainnya terjadi: selain perseteruan dengan selebritas Nikita Mirzani, kubu HRS juga membikin geger dengan pelanggaran protokol kesehatan.

Kejadian-kejadian ini membuat gugus tugas penanganan Covid-19, pemerintah daerah, petugas kepolisian, dan pemerintah secara umum menjadi bantalan empuk kritikan yang dilontarkan masyarakat karena dianggap tak berdaya melawan HRS. Melihat fenomena ini, Refly Harun mengatakan bahwa pemerintah tampaknya masih meraba-raba kekuatan HRS. "Pemerintah pasti sebenarnya kaget pada sambutan terhadap HRS yang sedemikian besar itu," katanya kepada M. Almer Sidqi dari GATRA.

Padahal, menurut Refly, yang membesarkan nama dan pengaruh HRS justru pemerintah sendiri. Pemerintah dianggap getol menghalang-halangi kepulangan HRS. Sementara itu, semakin dihalangi, kata Refly lagi, orang malah akan semakin banyak yang bersimpati.

Ada transformasi yang signifikan pada kubu FPI dan HRS selama lima tahun terakhir. Menurut Refly, kemunculan FPI pada mulanya tidak lebih daripada ormas kelas lokal atau —meminjam istilah yang Refly gunakan— kelas razia Ramadan, yang tidak bisa memainkan peran politik secara signifikan. Akan tetapi, situasi itu berubah ketika mereka, kata Refly, paling tidak, bisa memenangkan Anies Baswedan pada pilkada DKI Jakarta.

"Yang juga disokong oleh oposisi di luar sistem lainnya seperti GNPF-MUI, yang notabene, Ketua MUI-nya jadi wakil presiden sekarang. Padahal dia yang paling mempermasalahkan Ahok, bahkan sampai jadi ahli di persidangan," ucapnya. ■

HIDAYAT ADHININGRAT P. DAN ERLINA FURY SANTIKA

PERBANKAN

GATRA/ EVA AGRIANA ALI

Ilustrasi Maybank

PERBANKAN

Bank Bawah Tanah Maybank

Kasus pembobolan uang nasabah Maybank diduga sebagai praktik *shadow banking*. Bareskrim membuka peluang penetapan tersangka baru. OJK longgar mengawasi praktik shadow banking.

Seperti tak ada pengawasan dan perlindungan, pembobolan dana nasabah di industri perbankan kembali terjadi. Kali ini korbannya dari kalangan milenial, Winda Dwipattdiana Lunardi. Nilai tabungan yang raib sebesar Rp17,9 miliar di PT Bank Maybank Indonesia Tbk. Di rekening Winda, uang yang tersisa tinggal Rp600.000.

Atlet *e-sport* itu membuka rekening di Maybank pada 27 Oktober 2014. Ketika itu usianya 20 tahun dan masih berstatus mahasiswa

The University of Western Australia, Jurusan Pemasaran. Setoran awalnya, Rp5 miliar.

Ibu Winda, Floletta Lizzy Wiguna, yang juga nasabah Maybank, turut menjadi korban pembobolan. Nilai tabungan yang hilang sekitar Rp5 miliar. Tabungan yang tersisa di rekening tak sampai Rp17 juta.

Kejadian ini terendus ketika Floletta ingin menarik sebagian uang tabungannya pada Februari lalu. Ternyata, pihak Maybank tidak bisa mencairkan uang Floletta karena saldonya tidak cukup. Padahal, selama ini Floletta tidak pernah mengotak-atik tabungannya.

Tahu ibunya kehilangan uang di bank asal Malaysia tersebut, Winda mengecek rekeningnya. Naas, uang Winda juga hilang dari rekening. Jika ditotal, tabungan Winda dan Floletta yang dibobol mencapai Rp22,9 miliar.

Winda dan keluarganya pun melaporkan peristiwa ini ke pihak manajemen Maybank. Menurut Winda, laporan pertama tidak direspons pihak Maybank. Winda kembali mengirimkan laporan ke Maybank.

Dua hari setelah itu, Maybank menanggapi laporan tersebut. Dalam suratnya, Maybank mengatakan bahwa masalah sudah selesai. Tanpa penjelasan tentang nasib uang keluarga Winda. "Dan di situ kita kecewa sebagai nasabah, kita enggak pernah diajak komunikasi, diajak ketemu," katanya dalam konferensi pers, pekan lalu.

Tak puas dengan penanganan Maybank, keluarga Winda melaporkan penggelapan uang mereka ke Bareskrim Polri dengan nomor laporan, LP/B/0239/V/2020/Bareskrim tanggal 8 Mei 2020. Setengah tahun kemudian, Bareskrim menetapkan Kepala Cabang Bank Maybank Kebayoran Arcade, Albert, sebagai tersangka dengan dugaan menggondol uang keluarga Winda.

Belakangan diketahui, semua uang tabungan Winda dan Floletta berasal dari Herman Lunardi. Herman merupakan ayah Winda, sekaligus suami Floletta. Ia merupakan pemilik PT Sinar Sakti Union. Perusahaan ini bergerak di industri manufaktur produk elastis dengan jenama Penguin Elastic.

Semua saldo Winda dan Floletta ditransfer Herman melalui Albert, termasuk setoran awal untuk membuka rekening. Albert mendaftarkan rekening Winda dan Floletta ke sistem Maybank. Setelah itu, uang ditarik Albert. Di sinilah Albert beraksi. Ia menggunakan uang Winda dan Floletta tadi untuk berinvestasi di *forex* dan produk asuransi.

Kepada Wartawan Gatra, Erlina F Santika, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri, Brigjen Pol Helmy Santika, menceritakan bahwa Albert pernah mendatangi kantor Herman Lunardi. Tujuannya, menitipkan beberapa dokumen untuk membuka rekening, seperti aplikasi data diri nasabah, blangko formulir, slip aplikasi kiriman uang, serta pemindahbukuan. Berkas ini diberikan kepada Herman Lunardi untuk ditandatangani oleh Winda.

INSTAGRAM.COM/ EVOS.EARL

Winda Dwipattdiana Lunardi

Selanjutnya, formulir tersebut dibawa Albert ke kantornya. Tak lupa, Albert mencantumkan nomor telepon yang sudah disiapkan. Tujuannya, agar memudahkan jika ada pengecekan dari bank. Tersangka lalu memasukkan data tersebut ke dalam sistem bank.

Saat ini, pihak kepolisian terus mengembangkan kasus ini. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen (Pol) Awi Setiyono, mengatakan bahwa pihaknya masih mencari adanya dugaan keterlibatan pelaku lain dalam kasus ini. "Tidak tertutup kemungkinan adanya tersangka-tersangka lain," katanya.

***

Kuasa hukum Maybank, Hotman Paris Hutapea, menjelaskan bahwa kliennya akan membayar uang Winda dan Floletta asalkan kasus ini terang benderang. "Kalau diduga ada orang lain terlibat, *masak* bayar begitu saja. Kira-kira begitu," kata Hotman kepada Wartawan GATRA, Qonita Azzahra.

Menurut Hotman, ada beberapa kejanggalan dalam kasus ini. Pertama, mengenai kesepakatan bunga 7% per tahun dari nilai tabungan. Persentase tersebut di atas bunga deposito pada umumnya. Keanehannya, menurut Hotman, bunga tersebut tidak dibayarkan kepada Winda dan Floletta, melainkan mengalir ke rekening Herman. "Bunga tersebut bukan ke pemilik rekening," katanya.

Total bunga yang ditransfer Albert ke Herman sebesar Rp567 juta. Menggunakan rekening pribadi Albert di Maybank dan BCA. Berdasarkan kalkulasi Hotman, sepanjang 2014-2016, seharusnya total bunga yang diterima paling tidak Rp1,2 miliar. "Winda dan ibunya enggak pernah protes soal ini," ujarnya.

Kejanggalan kedua, buku tabungan dan ATM tidak dipegang oleh Winda, melainkan dipegang Albert. Anehnya, Winda menandatangani tanda terima buku tabungan dan ATM. "Anda sebagai pemilik uang kenapa Anda biarkan kartu ATM Anda dipegang orang lain. Itu lagi diselidiki penyidik," ujarnya.

> "Kami tidak menuduh pemilik rekening ikut membantu, *tapi* Anda dan lembaga hukum nanti akan menilai, adanya kejanggalan-kejanggalan dalam kasus ini."
>
> **Hotman Paris Hutapea**

Kejanggalan ketiga, adanya aliran dana dari rekening Winda untuk membeli polis Prudential, perusahaan asuransi, senilai Rp6 miliar. Janggalnya, dalam sebulan, ada aliran uang dari Prudential ke rekening Herman senilai Rp4,8 miliar.

Terakhir, Albert menggunakan uang Winda di produk investasi seperti bermain valuta asing (*trading forex*). Hotman mempertanyakan, adanya kemungkinan praktik ini dilakukan untuk memperoleh imbal hasil tinggi untuk membayar bunga 7% tadi. "Kami tidak menuduh pemilik rekening ikut membantu, *tapi* Anda akan menilai nanti dan lembaga hukum nanti akan menilai kejanggalan-kejanggalan itu," ujarnya.

Menurut hasil pemeriksaan pihak Bareskrim terhadap tersangka Albert, diketahui bahwa Albert memang menyimpan buku dan kartu ATM Winda. "Nasabah diberi buku dan kartu ATM. Namun oleh tersangka tidak diberikan kepada nasabah Winda," kata Helmy.

Helmy mengatakan, penyidik juga sedang menelusuri aliran uang Winda ke asuransi Prudential sebesar Rp6 miliar. Helmy menyebut tersangka sudah mengakui adanya aliran itu.

Pengajuan Prudential itu sendiri dilakukan dengan cara pindah buku atas nama Winda ke rekening yang sudah ditandatangani oleh nasabah itu sebelumnya. "Tujuannya adalah untuk mendapatkan *performance* atau target cabang, untuk mendapat nama dan keuntungan pribadi tersangka," Helmy menjelaskan.

DOK.GATRA/ RIFKI M. IRSYAD

Uang asuransi itu kemudian dibuat atas nama Herman Lunardi dan dicairkan ke rekening Herman senilai Rp4,8 miliar. Helmy menegaskan, pengelolaan rekening tersebut dilakukan tersangka sendiri tanpa sepengetahuan Herman Lunardi. "Albert dan Herman dipastikan tidak ada hubungan atau persekongkolan," katanya.

***

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso menduga, kasus Maybank merupakan praktik *shadow banking*. Istilah ini kerap disebut sebagai bank bawah tanah. Aksi ini biasanya di luar dari peraturan perbankan.

Cara mainnya, yaitu dengan menyamarkan kegiatan non-bank dengan seolah-olah menawarkan produk perbankan. "Sekarang ini ada produk bank yang diberikan oleh non-perbankan. Ini yang kita sebut dengan *shadow banking*," ujarnya pekan lalu.

Menurut praktisi hukum yang sering menangani perkara di industri jasa keuangan, Alvin Lim, jika uang nasabah tidak dikembalikan, Maybank akan memperburuk citra perbankan di masyarakat.

Pasalnya, bisnis di industri perbankan adalah bisnis kepercayaan. "Bayangkan kalau kita sudah setor melalui *teller*, tiba-tiba uang kita hilang. Pihak bank bilang, itu yang salah *teller*-nya. Bisa hilang kepercayaan nasabah," katanya kepada GATRA.

Mantan Vice President Bank of America ini menganjurkan agar Maybank membayar uang nasabah terlebih dahulu. Setelah itu, jika Maybank menemukan adanya indikasi keterkaitan Winda atau Herman Lunardi dalam kasus pembobolan tersebut, Maybank bisa menggugat balik pihak keluarga Winda. "Makanya si Hotman suruh Maybank bayar dahulu, supaya dia bisa *laporin* kalau ada unsur kerugian (Maybank)," katanya.

Alvin menjelaskan, kesalahan kepala cabang tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab bank, karena kepala cabang dipilih oleh manajemen bank. Di sampin itu, pihak Maybank seharusnya memiliki prinsip *fiduciary duty*, yang memiliki tanggung jawab mengawasi dana nasabah. "Jadi enggak sembarangan mereka bisa bilang, enggak ada kewajiban mereka," ujarnya.

Menurut eks pejabat US Bank ini, korban juga sudah mengatakan bahwa dirinya tidak pernah memberikan otorisasi atau persetujuan untuk menggunakan uangnya ke portofolio investasi. "Kalau ada surat kuasa, boleh kasih kewenangan ke Kacab. Nah, sekarang ada enggak Winda kasih surat kuasa ke Kacab," ujarnya.

Alvin membeberkan, praktik *shadow banking* lain juga pernah terjadi di Bank Sinarmas. Menurutnya, ada salah satu oknum kepala cabang di bank tersebut pernah menawarkan kliennya yang merupakan nasabah Bank Sinarmas untuk menutup tabungan depositonya.

Kemudian oknum kepala cabang tersebut meminta klien untuk mengalihkan uangnya ke salah satu sekuritas dengan iming-iming bunga mencapai 10%. "Nasabahnya mengira produknya itu tetap produk Sinarmas. Padahal bukan," ujar Alvin.

Menurut temuan Alvin, kepala cabang bank memang kerap menjadi agen asuransi dan sekuritas. Ia menggunakan data nasabah bank dan kedekatannya dengan nasabah untuk menawarkan produk non-bank.

Alvin menganalogikan seorang kepala cabang bank yang sudah dekat dengan nasabah, lalu ia ajak bertemu nasabah itu di restoran. "Di situ ikut istri Kacabnya. Nanti istrinya yang menawarkan asuransi," katanya.

Alvin juga mengkritik sistem mitigasi atas aksi pembobolan uang nasabah di perbankan yang masih longgar. Padahal, jika kasus ini sering terjadi, kepercayaan nasabah ke perbankan bisa menurun. Dampaknya, akan memengaruhi bisnis industri keuangan lainnya. "OJK tidak tegas terhadap industri jasa keuangan. Mohon maaf, sangat kurang pengawasannya. Asuransi jebol, bank jebol. OJK ke mana," katanya.

HENDRY RORIS SIANTURI

Awi Setiyono

DOK.HUMAS POLRI

KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Jalan Sulit Menuju

Masuk dalam 10 destinasi prioritas, plus KEK Pariwisata, Kabupaten Pulau Morotai sulit berkembang karena minimnya akses tranportasi. Investor asing kurang tertarik. Industri wisata belum berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

Pulau Zum-Zum di Kabupaten Morotai, Maluku Utara

Pertengahan Oktober lalu, saya mendapat kesempatan berkunjung ke Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara. Wilayah yang mendapat predikat pulau terdepan dan terluar ini berhasil lepas dari status daerah tertinggal pada tahun lalu.

Tak cuma itu, Morotai ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata melalui Peraturan Pemerintah Nomor 50/2014, dengan luas area 1.101,76 hektare. Pada 1 April 2019, Presiden Joko Widodo meresmikan KEK ini.

Sebagai pulau terluar di sisi timur laut Indonesia, Morotai dekat dengan negara-negara ASEAN dan Asia Timur. Di masa Perang Dunia II, Morotai menjadi salah satu basis militer Amerika Serikat di wilayah Pasifik. Tak mengherankan, banyak peninggalan ataupun lokasi bersejarah di sini.

Selain menjual wisata sejarah, wisata baharinya tak kalah menarik. Keindahan pantai dengan pasir-pasir putih nan lembut, ditambah dengan

Surga Bahari

GATRA/ ARDI WIDI YANSAH

pesona biota lautnya yang menjadi destinasi favorit para penyelam. Ada 52 titik *spot diving*.

Pemerintah pusat mendesain KEK Morotai sebagai destinasi wisata internasional. KEK ini diperkirakan menarik investasi sebesar Rp30,44 triliun, serta diproyeksikan menyerap 30.000 tenaga kerja hingga tahun 2025. Namun, dengan datangnya serangan pandemi Covid-19, seberapa dekat mimpi itu bisa diraih?

Sebagai wisatawan, saya merasa perjalanan dari Jakarta menuju Morotai menguras banyak tenaga. Berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta dengan jarak tempuh tiga jam 15 menit dan mendarat di Bandara Sutan Babullah Ternate, Maluku Utara. Sayangnya, tak ada penerbangan ke Morotai karena bandara tujuan, Bandara Pitu Morotai tengah tutup.

Mau tak mau, saya melanjutkan perjalanan dengan kapal cepat ke kota Sofifi, selama satu jam, dilanjutkan perjalanan darat ke Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara selama empat jam, barulah menyeberang dengan kapal cepat ke Morotai selama dua jam. Jalan menuju surga bahari ini sungguh melelahkan.

Ketika tiba di tujuan pun, suasana Morotai sepi pengunjung. Destinasi ikonik Morotai, yakni Pulau Dodola, sepi pelancong. Objek unggulan lainnya, Museum Trikora, yang berisi benda-benda peninggalan sejarah Perang Dunia II pun tutup.

Ternyata, Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai memang menerapkan pembatasan pendatang di

masa adaptasi kebiasaan baru. Setiap orang yang baru datang wajib menjalani tes usap (*swab test*) gratis yang dibiayai pemda.

"Kalau saya buka semuanya [tentang mobilitas], berat biayanya karena biaya *swab*-nya gratis," kata Bupati Pulau Morotai, Benny Laos.

Di masa pandemi, Benny menuturkan, akselerasi pembangunan pariwisata Morotai cukup terhambat. Pasalnya, semua pihak fokus menanggulangi Covid-19. Anggaran pun direalokasi untuk penangangan wabah.

Benny menyebut konektivitas menjadi hambatan terberat yang dihadapi pemkab dalam mengembangkan sektor pariwisata Morotai. Untuk transportasi laut, Pemkab Pulau Morotai meminta KM Dorolonda untuk menambah rute ke Morotai.

KM Dorolonda adalah kapal penumpang dengan kapasitas angkut 2.000 penumpang, milik PT Pelni Persero. Rute pelayaran KM Dorolonda adalah Tanjung Priok-Surabaya-Makassar Bau Bau-Namlea-Ambon-Ternate-Bitung (PP).

"Kalau kapal penumpang ini singgah dari Bitung (Manado) ke Morotai, kunjungan wisatawan akan naik," ujarnya.

Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut PT Pelni, Masrul Khalimi, mengatakan pihaknya tengah mengkaji permintaan tersebut. Oktober lalu, ia mengunjungi Morotai untuk melihat kapasitas sandar di pelabuhan Morotai. Hasilnya, KM Dorolonda sangat memungkinkan untuk sandar di Morotai.

"Hasil kunjungan kerja ini, berikut pemeriksaan kami ke dermaga penumpang, akan kami laporkan dan menjadi bahan evaluasi untuk diusulkan ke Kementerian Perhubungan. Bila diterima, KM Dorolonda dapat mulai berlayar ke

DOK.GATRA

Benny Laos

Morotai tahun 2021," tutur Masrul.

Sementara angkutan laut menemukan jalan keluar, transportasi udara justru masih mandek. Sebagai KEK Pariwisata sekaligus destinasi pariwisata prioritas, Morotai belum punya bandara komersial. Saat ini, akses penerbangan ke Morotai hanya rute Bandara Sultan Babullah Ternate-Bandara Pitu, Pulau Morotai, dengan waktu tempuh 45 menit.

Bandara Pitu ini bukanlah bandara komersial, melainkan landasan udara milik TNI AU. "Kendala kita hanya di akses transportasi udara karena kegiatan operasional semua terganggu. Serba salah, sulit dengan alasan pertahanan terus," katanya.

Meski ditetapkan sebagai KEK Pariwisata dan masuk 10 destinasi prioritas, sektor pariwisata belum berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah Morotai. Pemasukan daerah masih mengandalkan sektor perikanan dan perkebunan. Namun, perlahan sektor pariwisata mulai dilirik masyarakat setempat.

"Masyarakat sudah banyak membuat kerajinan lokal, juga oleh-oleh seperti keripik dan lainnya. Lalu kuliner juga mulai banyak rumah makan. Ini sudah mulai kami persiapkan," Benny memaparkan.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menetapkan Morotai sebagai salah satu dari 10 destinasi wisata prioritas nasional. Dengan *brand* 10 Bali Baru, ke-10 destinasi prioritas tersebut adalah Danau Toba, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Pulau Seribu, Candi Borobudur, Mandalika, Wakatobi, Labuan Bajo, dan Morotai.

Direktur Pengembangan Destinasi Regional II Kemenparekraf, Wawan Gunawan, mengatakan bahwa Menteri Parekraf Wishnutama Kusubandio telah bertemu Bupati Pulau Morotai.

Substansinya, kementerian bersedia membantu percepatan konektivitas internasional ke Morotai serta pembangunan dan pengembangan infrastruktur pariwisata.

"Di samping itu, Menpar juga akan mengirim investor perhotelan untuk berinvestasi di Morotai," kata Wawan kepada wartawan GATRA Wahyu Wachid Anshory.

Menurut Wawan, kedua pejabat ini juga membahas percepatan regulasi pentapan Morotai sebagai destinasi superprioritas, sehingga perhatian pemerintah pusat akan lebih fokus diberikan dibandingkan dengan daerah prioritas lainnya.

***

KEK Pariwisata Morotai dikembangkan dan dikelola oleh PT Jababeka Morotai. Sekretaris Perusahaan PT Kawasan Industri Jababeka Tbk. (KIJA), Muljadi Suganda, mengatakan, meski pandemi, pembangunan infrastruktur masih berjalan dan tak terkendala. Saat ini, Jababeka berencana membangun hotel resor terpadu dengan 600 unit kamar.

Pembangunan tersebut salah satunya dipersiapkan untuk mengantisipasi wisatawan luar negeri yang

datang ke Pulau Morotai pada saat virus corona mereda dan semuanya kembali normal.

Selama pandemi, Morotai tetap dikunjungi wisatawan domestik. Mereka cenderung menghabiskan waktu libur panjang di hotel dan resor. "Dengan kondisi pandemi, justru mereka senang, karena mereka di sana kan enggak banyak orang sehingga bebas bisa menikmati alam," ujarnya kepada Dwi Reka Barokah dari GATRA.

Namun, wabah Covid-19 membuat Jababeka kesulitan mendapatkan investor baru, terutama investor asing. Pembatasan sosial yang diterapkan banyak negara membuat investor asing sulit melirik Morotai.

"Kita tetap memasarkan kepada investor, cuma tetap semuanya juga terdampak pandemi, terutama dalam hal kunjungan ke sana (Morotai)," katanya.

Solusinya, Jababeka gencar mempromosikan dan memasarkan KEK Morotai secara daring untuk menarik minat investor. Perusahaan optimistis bahwa Morotai dapat menggaet pemodal-pemodal baru karena kawasan itu tak hanya disiapkan sebagai destinasi wisata, tetapi juga kawasan bisnis.

"Banyak pihak yang tengah melakukan proses negosiasi untuk bekerjasama mengingat Morotai memiliki berbagai kemudahan investasi," ujarnya.

Menurut Muljadi, kemudahan tersebut difasilitasi pemerintah dalam bentuk perpajakan, kepabeanan, cukai, lalu lalu lintas barang, ketenagakerjaan, keimigrasian, pertahanan, serta perizinan.

Bupati Pulau Morotai, Benny Laos, mengatakan ada beberapa pemodal asing melirik, antara lain Korea Selatan, Jepang, dan Cina. Namun, belum ada tindak lanjut.

"Rata-rata tertarik di pariwisata dan perikanan. Hanya memang kembali lagi kita kendala untuk akses, biaya logistik," ia menjelaskan.

Pemerintah pusat memberikan beragam fasilitas fiskal bagi investor di KEK. Di Morotai, KEK Pariwisata hanya mencakup kawasan 1.101,76 hektare. Di luar kawasan khusus tersebut, keringanan pajak tersebut tak berlaku.

Sadar bahwa daerahnya sedang tumbuh dan butuh banyak investasi, Pemkab Morotai pun menebar gula-gula penarik investor berupa keringanan pajak.

"Saya membuat kebijakan, siapa saja yang mau berinvestasi di Morotai gratis IMB dan gratis pajak tiga tahun. Tentu ini tergantung nilai investasinya," Benny mengungkapkan.

PUTRI KARTIKA UTAMI

	WISATAWAN NUSANTARA	WISATAWAN MANCANEGARA	TOTAL
2016	14.255	467	14.722
2017	22.675	584	23.259
2018	61.301	914	62.215
2019	119.100	2.396	121.496
2020	35.730	185	35.915
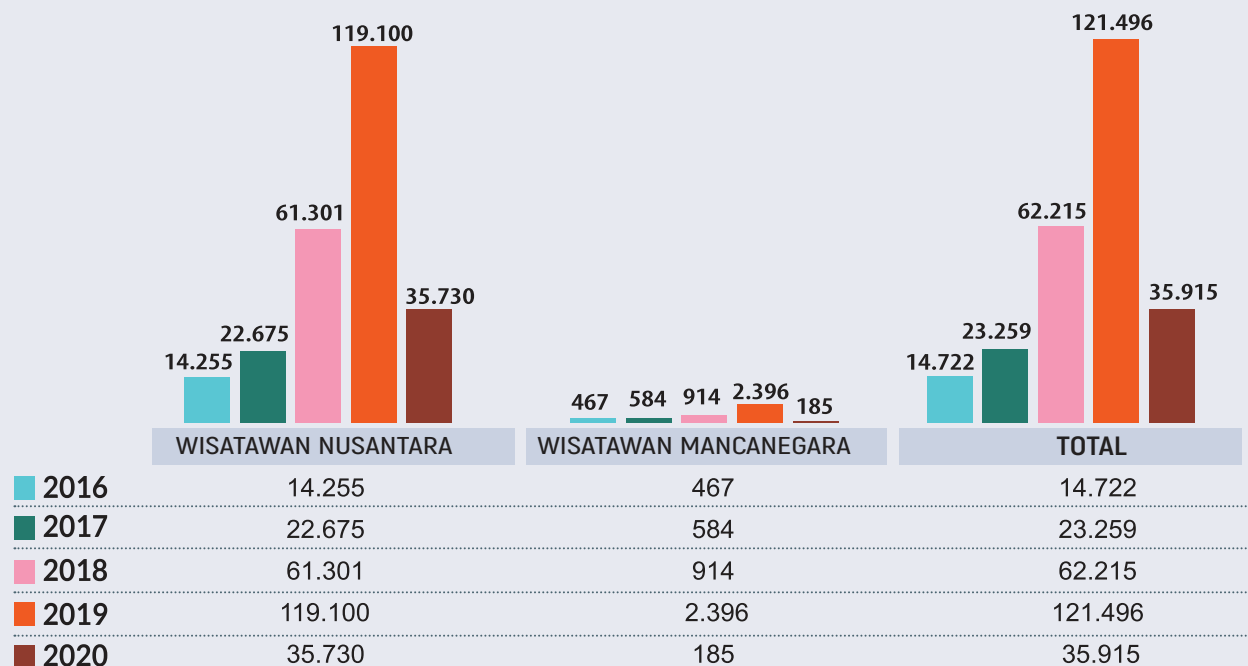
Sumber: Pemkab Pulau Morotai

REUTERS/LEAH MILLIS

Donald Trump

PEMILU AS

Perlawanan Trump untuk Bertahan

Pemilihan Presiden Amerika Serikat menyisakan masalah. Kubu kandidat petahana menolak hasil pemilu dan menyatakan diri sebagai pemenang. Perseteruan di sejumlah negara bagian tentang *electoral vote* semakin memanas. Jika di akhir masa jabatan presiden pada 20 Januari nanti masih tidak ada pemenang, maka Ketua DPR akan menjadi pejabat sementara.

Pemilihan Presiden Amerika Serikat sudah berakhir dua pekan lalu. Sejumlah media dan lembaga survei memastikan pasangan Joe Biden-Kamala Harris berhasil menang dan meraup 290 *electoral votes*, pada Sabtu pagi lalu waktu setempat. Padahal, untuk menjadi presiden ke-46, Biden hanya butuh 270 suara.

Meski sudah ada hasil resmi, Donald Trump sebagai peserta yang dikalahkan tak mau terima. Bahkan sejak sebelum pemilu yang digelar3 November, taipan properti ini sudah kerap menyuarakan bahwa ada banyak kecurangan di pilpres 2020. Sikapnya ini tak berubah sejak pengumuman 7 November tersebut. "Saya memenangkan pemilu!" Kalimat itu setidaknya sudah dicuitkan Trump lewat akunnya *@realDonaldTrump* selama lima kali selama dua pekan ini.

Juga, "Demokrat bekerja sama dengan rekanannya media-media palsu mencoba mencuri hasil Pemilu.", "Ini adalah Pemilu paling bermasalah sepanjang sejarah!", dan "Penghitungan ulang yang palsu berlangsung di Georgia. [Penghitungan ulang itu] tidak ada artinya karena mereka tak mengizinkan tanda tangan diperlihatkan dan diverifikasi."

Itu hanya sedikit dari sekian banyak protes yang dilayangkan Trump di media sosial. Alhasil, perusahaan pengelola sosial media Twitter memutuskan memberikan pernyataan peringatan di sejumlah cuitan, terutama ocehan Trump, yang menuding pemilu berjalan curang tanpa ada bukti nyata.

"Sejumlah sumber memberikan pendapat berbeda tentang pemilu ini." Lalu, "Klaim soal kekacauan pemilu ini adalah bertentangan." Demikian muncul tulisan biru yang ditempelkan Twitter di bagian bawah cuitan-cuitan Trump.

Trump boleh saja menolak mengakui kemenangan Biden, tetapi para pakar mengatakan tidak ada jalan konstitusional baginya untuk tetap menjadi presiden.

"Jika negara patuh pada supremasi hukum, saya melihat tidak ada jalan konstitusional yang masuk akal bagi Trump untuk tetap menjabat sebagai presiden. Kecuali jika ada bukti baru telah terjadi kegagalan besar-besaran sistem pemilu di banyak negara bagian," ujar Richard Hasen, seorang profesor hukum di University of California Irvine (UCI), yang memiliki spesialisasi soal pemilu.

Meski demikian, konstitusi tampaknya berhadapan dengan lawan tangguh: Partai Republik dan pejabat pendukung Trump. Apalagi mereka sangat lihai bersilat lidah. "Akan ada transisi yang mulus ke pemerintahan Trump periode kedua," ucap Menteri Luar Negeri Mike Pompeo, dilansir *The Guardian.*

Jaksa Agung William Barr malah memberikan wewenang kepada jaksa

> "Demokrat bekerja sama dengan rekanannya media-media palsu mencoba mencuri hasil pemilu."
>
> **Donald Trump**

federal untuk mulai menyelidiki penyimpangan pemilu. Dengan demikian, mereka mengambil alih tugas Kepala Unit Kejahatan Pemilu Departemen Kehakiman.

Terlepas dari semua upaya kubu Trump, sangat tidak mungkin dia dapat menemukan cara untuk tetap berkuasa atau bahkan melakukan kudeta. Alasan pertama adalah keputusan dari *electoral college* atau lembaga pemilih.

Meski media dan sejumlah analis bisa memprediksi raihan suara elektoral (*electoral vote*), secara resmi mereka baru akan bertemu pada 14 Desember. *Electoral college* terdiri dari 538 anggota *elector* di 50 negara bagian. Makin besar negara bagiannya, makin banyak anggota *elector* mereka.

Proyeksi kemenangan presidensial Biden sekarang terutama ditentukan dari fakta bahwa negara bagian yang selama ini mendukung Partai Republik kini berubah menjadi biru. Michigan, Nevada, Wisconsin, dan Arizona adalah beberapa di antaranya.

Pennsylvania dan Georgia menjadi kejutan besar, karena ini adalah negara bagian andalan GOP atau Partai Republik yang mengusung Trump untuk mendulang suara. Margin kemenangan yang tipis membuat pemerintah Georgia memutuskan melakukan penghitungan suara ulang.

"Saya pikir yang harus dilakukan presiden sekarang adalah berhenti bersikap seperti bocah. Dia harus menerima fakta bahwa dia kalah dia harus memberi selamat pada pihak yang menang," ucap Wali Kota Philadelphia, Jim Kenney. Philadelphia adalah kota terbesar di Pennsylvania dan terbesar kelima di AS.

Secara teori hukum, di negara-negara bagian pro-Partai Republik, seperti Michigan, Wisconsin, dan Pennsylvania, anggota parlemen bisa memutuskan suara *elector* mereka dan mengabaikan hasil pemilu pilihan rakyat. Hukum negara memungkinkan legislator melakukan aksi tersebut jika masyarakat negara bagian dianggap gagal membuat pilihan. Tapi ini tak bisa dilaksanakan karena tidak ada bukti apa pun telah terjadi kecurangan sistemik.

Dengan demikian, jika Trump hendak memenangkan *electoral college*, beberapa negara bagian harus mengambil langkah luar biasa tadi. Sebuah langkah yang akan menyebabkan reaksi ekstrem dan krisis demokrasi yang nyata di seluruh negeri.

"Ironisnya, Amerika berhasil menyelenggarakan pemilu yang sangat mulus, dengan rekor jumlah partisipasi pemilih, dalam keadaan yang sangat sulit saat pandemi. Di sisi lain, sejumlah besar pendukung presiden malah menuding proses pemilu ini cacat," ujar profesor hukum di Universitas New York, Richard Pildes.

Sebelumnya, tim kampanye Trump telah mengajukan banyak gugatan yang meragukan secara hukum sejak hari pemilihan. Tujuan gugatan ini, sebut *The Guardian*, tampaknya bukan untuk benar-benar menjungkirbalikkan hasil pemilu, tetapi mencoba menciptakan ketidakpastian dan membatalkan proses penghitungan suara.

Setiap negara bagian memiliki tenggat waktu sendiri untuk menetapkan hasil pemilihan. Kuantitas itu lantas digunakan untuk mengalokasikan suara elektoral. Setidaknya di dua negara bagian, Pennsylvania dan Michigan, kubu Trump berusaha memblokir pejabat agar tidak memberikan hasil penetapan.

Jadwal penetapan itu penting karena UU Federal mengatakan bahwa selama hasil pemilu bisa diselesaikan paling lambat 8 Desember tahun tersebut, maka hasilnya adalah konklusif. Aturan itu membantu Kongres, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas suara elektoral, dari hasil pemilu yang menebak-nebak.

Dengan memundurkan proses penghitungan surat suara, pihak Trump berusaha melewati tenggat 8 Desember. Dengan demikian, menciptakan lebih banyak ruang untuk menebak-nebak hasil pemilu.

STEVE ZYLIUS/UCI/UCI.EDU

"Jika negara patuh pada supremasi hukum, tidak ada jalan konstitusional yang masuk akal bagi Trump untuk tetap menjabat sebagai presiden."

Richard Hasen

JOHN AMIS/ATLANTA JOURNAL-CONSTITUTION/TNS/ABACAPRESS.COM

Penghitungan suara di Lawrenceville, GA, Amerika Serikat

"Tapi jika memang seperti itu strategi tim kampanye Trump, kecil kemungkinan mereka bisa membawa [kasus] ini ke pengadilan. Negara-negara bagian akan mulai mengesahkan total suara mereka dalam waktu kurang dari 10 hari. Sejauh ini, tidak ada dasar dalam klaim yang dibuat [kubu Trump] bagi pengadilan untuk menghentikan proses penghitungan itu," Pildes menjelaskan.

Katakanlah terjadi skenario terburuk bahwa tuntutan hukum membuahkan hasil dan parlemen yang dipimpin Republik bisa mengesampingkan hasil suara rakyat di beberapa negara bagian. Apakah ada cara lain untuk menghentikan Trump mengubah hasil akhir pilpres?

Faktanya memang ada. Gubernur Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, dan Nevada adalah politisi Demokrat. Tentu saja mereka ogah menyetujui serangkaian pemilih elektor pendukung Trump, padahal faktanya pemungutan suara jelas menunjukkan Biden menang di sana. Sebaliknya, gubernur-gubernur ini akan menetapkan agar para pemilih elektor adalah para pendukung Biden.

Semua konflik ini akan berujung di Kongres. Tak bisa disangkal bahwa UU yang mengatur soal tata cara Kongres mengatasi perselisihan pemilih dari suatu negara bagian sangat membingungkan. Tapi para pakar hukum yakin bahwa keputusan yang didukung oleh gubernur negara bagian adalah yang sah menurut hukum.

Meski demikian, Trump punya satu harapan kecil di sini. Menurut UU, presiden Senat adalah wapres petahana, dalam hal ini Mike Pence. Bukan tak mungkin dia akan mengendalikan proses penghitungan suara elektoral itu. Tapi, sengketa pemilih antara DPR dan Senat adalah skenario terburuk dan Mahkamah Agung AS mungkin akan diminta untuk turun tangan.

Terlepas dari berapa lama perselisihan itu berlangsung, konstitusi menetapkan satu tenggat waktu terakhir. Meski penghitungan sedang berlangsung, masa jabatan presiden dan wakil presiden akan berakhir di tengah hari pada 20 Januari atau 21 Januari (jika 20 Januari jatuh pada Hari Minggu). Pada saat itu, jika tidak ada hasil akhir dalam perlombaan, ketua DPR petahana, Nancy Pelosi, akan menjadi penjabat sementara presiden.

Flora Libra Yanti

RCEP

Kemenangan Multilatelarisme

Dalam RCEP, negara-negara ASEAN bersama Cina, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru bersatu dalam blok perdagangan terbesar di dunia. Diharapkan menjadi pendorong pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Meneguhkan Cina sebagai mitra dagang ASEAN?

REUTERS

Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc (kiri) dalam acara penandatanganan kerjasama Regional Comprehensive Economic Association (RCEP)

Lima belas negara Asia Pasifik membentuk blok perdagangan bebas terbesar didunia yang meliputi sepertiga kekuatan ekonomi global dan menjangkau lebih dari 2 miliar konsumen. Blok perdagangan bernama Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership -RCEP) ditandatangani pada Minggu, 15 November lalu. Dengan demikian, berakhir proses pembentukannya yang berlangsung hampir satu dekade.

Penandatanganan dilaksanakan di akhir Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) RCEP ke-4 yang menjadi ba-

dan Perdagangan Bebas

gian dari rangkaian KTT ASEAN ke-37. Anggota RCEP terdiri dari 10 negara ASEAN, ditambah Cina, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru. Seremoni penandatangan dilakukan secara virtual. Menteri Perdagangan RI Agus Suparmanto menandatangani perjanjian tersebut disaksikan Presiden RI Joko Widodo di Istana Bogor, Jawa Barat.

Gagasan RCEP dicetuskan saat Indonesia memegang kepemimpinan ASEAN pada 2011. Tujuannya, mengonsolidasikan lima perjanjian perdagangan bebas (FTA) yang sudah dimiliki ASEAN dengan enam mitra dagangnya. Konsep RCEP kemudian disepakati negara anggota ASEAN akhir 2011 di Bali, Indonesia. Baru pada akhir 2012 setelah "menjual" konsep ini kepada enam negara mitra FTA ASEAN, para kepala negara/pemerintahan dari 16 negara pun sepakat meluncurkan perundingan RCEP pada 12 November 2012 di Phnom Penh, Kamboja. Pada awal 2013, para menteri perdagangan ASEAN sepakat menunjuk Indonesia sebagai koordinator ASEAN untuk perundingan RCEP. Kesepakatan ini bahkan diperluas oleh 16 menteri negara peserta perundingan dengan menunjuk Indonesia sebagai Ketua Komite Perundingan Perdagangan (Trade Negotiating Committee -TNC) RCEP.

Pada sisi lain, RCEP dinilai semakin meneguhkan posisi Cina sebagai mitra dagang dengan negara-negara Asia Tenggara, Jepang, dan Korea Selatan. PM Cina, Li Keqiang, memuji kesepakatan ini sebagai kemenangan multilateralisme dan perdagangan bebas. "Penandatanganan RCEP tidak hanya menjadi tonggak pencapaian kerja sama regional Asia Timur, melainkan juga kemenangan multilateralisme dan perdagangan bebas," ujarnya seperti ditulis laman *China Daily* pada Minggu, 15 November lalu).

Li mengatakan, setelah delapan tahun negosiasi, penandatanganan perjanjian telah membawa harapan kepada masyarakat di tengah situasi internasional yang suram saat ini, yang menunjukkan bahwa multilateralisme dan perdagangan bebas tetap menjadi arah yang benar bagi ekonomi dunia dan kemajuan manusia.

Bagi Cina, RCEP menjadi perjanjian bersejarah karena untuk pertama kalinya mereka bisa meneken perjanjian pengurangan tarif dengan Jepang. Kesepakatan ini juga yang pertama menyatukan tiga kekuatan ekonomi Asia, Cina, Jepang, dan Korea Selatan dalam satu perjanjian perdagangan bebas.

PERINGKAT EASE OF DOING BUSSINESS 2019 ANGGOTA RCEP

Sumber: Bank Dunia

“RCEP merupakan kesepakatan perdagangan regional terbesar di dunia dan diharapkan dapat mendorong percepatan pemulihan ekonomi dunia dari resesi global terparah sejak perang dunia kedua ini,”

Agus Suparmanto

GATRA/EVA AGRIANA ALI

Sebaliknya, Amerika Serikat, seteru Cina dalam perang dagang, terkucil dari RCEP bahkan juga TPP (Trans-Pacific Partnership). TPP adalah blok perdagangan bebas yang diinisiasi Presiden Barack Obama. Amerika Serikat kini berada di luar dua blok perdagangan bebas yang menjangkau wilayah dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Amerika Serikat diduga belum akan melibatkan diri kembali dalam TPP, karena fokus pada penagangan Covid-19 di dalam negeri. Sementara itu, India menarik diri dari pembicaraan RCEP pada November tahun lalu. Namun para pemimpin ASEAN masih membuka pintu untuk bergabung.

RCEP akan membantu mengurangi atau menghapus tarif produk industri dan pertanian dan menetapkan aturan untuk transmisi data. Blok baru ini menjanjikan penghapusan sejumlah tarif antar-anggota. Ada yang segera diterapkan, ada pula yang akan dilaksanankan setelah jangka waktu 10 tahun. Namun belum diketahui detail produk yang segara dihapus tarifnya dan negara-negar mana yang segera menerapkan. “RCEP akan segera diratifikasi oleh negara-negara penandatangan dan selanjutnya akan diterapkan, yang pada gilirannya bisa berkontribusi pada pemulihan ekonomi pasca-pandemi Covid-19,” kata Nguyen Xuan Phuc, Perdana Menteri Vietnam, yang menjadi tuan rumah sekaligus ketua ASEAN seperti dilaporkan *Reuter* pada akhir pekan lalu.

***

Bagi pemerintah Indonesia, penandatanganan RCEP merupakan prestasi tersendiri di kancah perdagangan internasional. Menurut Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, Indonesia patut berbangga karena telah menggagas pada 2011, dari proses perundingan hingga penandatanganan kesepakatan. “Apalagi, RCEP merupakan kesepakatan perdagangan regional terbesar di dunia dan diharapkan dapat mendorong percepatan pemulihan ekonomi dunia dari resesi global terparah sejak perang dunia kedua ini,” ujarnya usai menandatangani dokumen RCEP pada Minggu, 15 November lalu.

Dalam kacamata peneliti ekonomi Institut Kajian Strategis Univer-

BELISH/SHUTTERSTOCK.COM

“Penandatanganan RCEP tidak hanya menjadi tonggak pencapaian kerjasama regional Asia Timur, tetapi juga kemenangan multilateralisme dan perdagangan bebas”

PM Cina Li Keqiang

sitas Kebangsaan Republik Indonesia, Eric A. Sugandi, RCEP bisa mengintegrasikan Indonesia ke rantai pasok atau jejaring produksi global. Untuk mencapai tujuan itu, pemerintah harus menyiapkan langkah yang tepat agar para pengusaha Indonesia bisa menjadi produsen barang setengah jadi maupun barang jadi. "Dan jangan hanya mengekspor bahan mentah atau barang yang nilai tambahnya tidak banyak," ucapnya kepada GATRA pada Senin, 16 November lalu.

Pemerintah, menurut Eric, perlu membenahi regulasi dan perangkat hukum nasional untuk menyambut realisasi RCEP. Begitu juga dengan sumber daya manusia serta penelitian dan pengembangan. Hal itu untuk meningkatkan peringkat kemudahan berbisnis (*ease of doing bussiness* —EoDB) Indonesia. Sebagai gambaran, pada 2019, Indonesia di peringkat ke-73. Lebih rendah daripada Singapura yang berada di posisi kedua, Malaysia (ke-12), Thailand (ke-21), Brunei Darussalam (ke-66), dan Vietnam (ke-70).

Eric juga menilai, banyak pengusaha Indonesia yang masih belum siap untuk memanfaatkan kemitraan terbesar se-Asia Pasifik ini. "Karena Indonesia sudah tanda tangan, ya mereka mesti siap kompetisi di pasar domestik maupun di pasar internasional (kalau orientasinya ekspor). Selalu ada risiko produsen domestik yang kalah dalam persaingan," ia menjelaskan.

Senada dengan Eric, Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad, menilai mayoritas pengusaha Indonesia yang belum siap untuk menjalankan RCEP di sektor jasa, seperti jasa sosial, komunikasi, keuangan, transportasi, dan konstruksi. Sebab, dibandingkan dengan sektor industri, jasa memiliki hambatan non-tarif yang relatif lebih besar. "Kalau produk yang saya sebutkan tadi (makanan, rokok, tembakau, minuman), kecuali pertanian. Umumnya relatif sudah siap," ujarnya.

Tauhid menilai, dengan menjadi anggota RCEP, Indonesia diharapkan menjadi sumber bahan baku dan pasar barang terbesar di ASEAN dan juga di kawasan Asia Pasifik. Terlebih jika melihat keunggulan Tanah Air di kedua bidang tersebut. Setelah Cina dan India, pasar Indonesia paling besar di antara negara-negara lain. "Apalagi sumber daya alam kita masih luar biasa besar, ditambah perkebunan, yang saya kira masih menjadi incaran negara-negara lain, karena mereka butuh pasokan," ia menjelaskan.

ROSYID

GATRA MAJALAH BERITA MINGGUAN

SIUPP: No. 297/SK/Menpen/SIUPP/C.1/1994, tanggal 13 Oktober 1994. **ISSN:** 0853-1706

Pendiri: M. Hasan
Penerbit: PT Era Media Informasi
Komisaris: Tommy S. Kusuma
Pemimpin Umum: Hendri Firzani
Direktur Utama: Hendri Firzani
Direktur Operasional: Budi Irawan
Penasihat: Edy Sumarso

MAJALAH GATRA
Pemimpin Redaksi: Mukhlison S. Widodo
Redaktur Pelaksana: Bambang Sulistyo
Sidang Redaksi: Aditya Kirana, Birny Birdieni, Fitri Kumalasari, Flora Libra Yanti, Gandhi Achmad, Hendry Roris P. Sianturi, Hidayat Adhiningrat P., Putri Kartika Utami, Rosyid
Sekretariat Redaksi & Marketing: Jumadi, Pamungkas Sapto Handoyo, Puspita Sari
Produksi:
Desain: Amin S. Putra (Kepala), Fritz Pelenkahu, Rico Wahyu
Foto: Ardi Widi Yansyah
Bahasa: Agus Teguh (Kepala), Rhea Febriani Tritami

MAJALAH GATRA REVIEW
Pemimpin Redaksi: G.A. Guritno
Redaktur Pelaksana: Nur Hidayat
Sidang Redaksi: Andhika Dinata, Sandika Prihatnala, Sujud Dwi Pratisto
Produksi:
Desain: Anas Priyo (Kepala)
Foto: Jongki Handianto (Kepala)
Riset dan Data: Rino

GATRA TV
Pemimpin Redaksi: G.A. Guritno
Produser Special Program: Riana Astuti
Produksi: Fandi, Fazri, Feby, Karim, Sammy

GATRA.COM
Pemimpin Redaksi: Mukhlison S. Widodo
Redaktur Pelaksana: Rohmat Haryadi
Sidang Redaksi: Anthony Djafar, Bernadetta Febriana
Liputan: Iwan Sutiawan (Koordinator), Qonita Azzahra, Dwi Reka B., Erlina Fury, M. Almer, M. Guruh Nuary, Ryan Puspa, Ucha Julistian, Wahyu Wachid
Biro Daerah: Abdul Aziz (Pekanbaru), Arif Koes Hernawan (Yogyakarta)
Fotografer: Adi Wijaya, Eva Agriana Ali
Uploader: Erry Sudiyanto

GATRA PEDIA
Kepala Bagian: Yustinus Sarjana
Produksi: Endang Sukendar (Kepala), Annisa Setya Hutami, Arif Sugiono, Rio Nugroho
Digital/Ecommerce & Data: Fatikhin

TIM PEMASARAN:
Kepala: Vinca S. Soemantri (Wilayah I), Gembong Wiroyudo (Wilayah II)
Wakil Kepala: Cicih, Fahrudin
Group Head: Leo Iqbal (Wilayah I), Maria I. Pakpahan (Wilayah II)
Staf Pemasaran: Edria Fausta K., Wanda Oktavia, Dewan Nugraha
E-mail: iklan@gatra.com

Staf Sirkulasi: Yudi Riyanto, Jupri B. Dair
E-mail: sirkulasi@gatra.com

Business Development Marketing: Fajar Lukito

Layanan Pelanggan: Puspita Sari
Telepon: (021) 79196935
Fax: (021) 79196936
E-mail: langganan@gatra.com

Pencetak: PT. Naga Ular Bersatu, Jakarta

Alamat Kantor: Gedung GATRA, Jl. Kalibata Timur IV No. 15, Jakarta 12740
Telepon: (021) 7973535 (hunting), Fax: 79196941, 79196942, E-mail: redaksi@gatra.com

UU CIPTA KERJA DAN UU MK

Menguji Cacat Beleid Sapu Jagat

Naskah UU Cipta Kerja resmi digugat secara formil dan materiil ke Mahkamah Konstitusi. Ada peluang legislatif atau *executive review*?

ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARI

Kemungkinan hilangnya beberapa ketentuan mengenai jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau pekerja kontrak pasca-pemberlakuan Undang-undang (UU) Cipta Kerja membuat Hakiimi Irawan Bangkid Pamungkas waswas. Karyawan perusahaan swasta itu menilai UU Cipta Kerja pada klaster Ketenagakerjaan mengandung ketentuan-ketentuan norma yang merugikan hak konstitusionalnya untuk dapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Kekhawatiran Hakiimi itu terungkap saat Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang uji materi terhadap UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Kamis pekan lalu. Sidang ini merupakan sidang uji formil terkait UU Cipta Kerja dengan Nomor Perkara: 91/PUU-XVIII/2020. Sidang ini terdiri dari lima penggugat. Selain Hakiimi, penggugat lainnya adalah seorang pelajar bernama Novita Widyana serta tiga mahasiswa, yakni Elin Diah Sulistiyowati, Alin Septiana, dan Ali Sujito.

Kuasa hukum pemohon, Happy Hayati Helmi, mengungkap beberapa kerugian konstitusional yang dialami kliennya. Antara lain, terpangkasnya waktu istirahat mingguan, menghapus sebagian kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh, menghapus sanksi bagi pelaku usaha yang tidak bayar upah. Kemudian pemohon II, yakni Novita Widyana, yang merupakan pelajar, merasa dirugikan karena setelah lulus ia berpotensi menjadi pekerja kontrak tanpa ada harapan menjadi pekerja tetap.

Sementara itu, pemohon III, IV, dan V, yang merupakan mahasiswa di bidang pendidikan Elin Diah Sulistiyowati, Alin Septiana dan Ali Sujito, merasa dirugikan karena sektor pendidikan masuk dalam UU Cipta Kerja. Mereka menilai dengan masuknya klaster pendidikan di UU Cipta Kerja bisa membuat pendidikan menjadi ladang bisnis.

Secara resmi UU Cipta Kerja digugat oleh empat pihak. Selain kelima penggugat tadi, masuk juga gugatan dari Dewan Pimpinan Pusat Federasi

Hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat (tengah), Wahiduddin Adams (kiri) dan Manahan MP Sitompul (kanan) memimpin sidang pengujian formil UU Cipta Kerja di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta

Serikat Pekerja Singaperbangsa, selanjutnya penggugat atas nama Zakarias Horota, Agustinus R. Kambuaya dan terakhir penggugat dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI).

Presiden KSPI, Said Iqbal, mengatakan bahwa KSPI sudah memasukkan gugatan uji materiil pada 2 November silam. Uji formil, setelah batas 45 hari undang-undang disahkan, juga akan dilakukan oleh KSPI.

Iqbal mengatakan bahwa KSPI, yang mewakili para pekerja, menilai prosedur pembuatan undang-undang sapu jagat ini cacat. “Dari mulai tidak ada keterlibatan publik, membuat draf diam-diam, sidang dan rapat antara panja baleg dan pemerintah yang dilakukan secara berpindah-pindah hotel, salah ketik, terburu-buru, kejar tayang, dan lain sebagainya,” kata Iqbal kepada GATRA, Ahad lalu.

Sementara itu, uji materil yang diajukan meliputi Pasal 88 tentang ketenagakerjaan, Pasal 89 tentang sistem jaminan sosial, Pasal 90 tentang badan penyelenggara jaminan sosial, dan Pasal 91 tentang pekerja migran. Dari empat poin tersebut, kata Iqbal, akan ada sekitar 100 pasal turunan yang akan diuji. Ia mengungkapkan, KSPI menyiapkan gugatan sebanyak 305 halaman beserta alat bukti dan materi undang-undang sebanyak 1.500 halaman, sehingga totalnya hampir mencapai 2.000 halaman.

Isu yang diangkat, antara lain, masalah upah minimum; KSPI menolak UMK bersyarat dan UMSK dihapus. Isu tentang PKWT atau karyawan kontrak; meminta agar karyawan kontrak memiliki periode kontrak dan batas waktu kontrak, supaya tidak ada kontrak terus-menerus seumur hidup.

Meski sudah ditandatangani Presiden, Undang-undang Cipta Kerja masih menjadi polemik.

Meski telah menyiapkan materi gugatan, Iqbal mengaku tetap gamang dengan nasib *judicial review* yang diajukan. Pasalnya, komposisi sembilan hakim konstitusi tidak serta-merta bisa dilepaskan dari kepentingan tertentu. Tiga orang hakim dipilih oleh DPR; tiga lainnya diusulkan oleh presiden; dan tiga lainnya dari Mahkamah Agung. Dari komposisi itu, hakim yang berasal dari DPR dan presiden berjumlah enam orang.

Meski demikian, tidak ada pilih-

Uji Pemanis Kekuasaan Hakim MK

Koalisi Selamatkan Mahkamah Konstitusi (MK) melayangkan gugatan uji materi terhadap revisi Undang-undang (UU) MK, yakni Nomor 7/2020, serta UU MK pertama, Nomor 24 tahun 2003. Keduanya digugat untuk diuji formil dan materiil. Lembaga Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (Kode Inisiatif), yang tergabung dalam koalisi itu, membeberkan beberapa alasan kenapa kedua UU itu patut digugat.

Pertama, pembentukan UU ini dilakukan di tengah kejadian bencana non-alam pandemi Covid-19. Pembahasannya pun hanya menghabiskan waktu tiga hari saja, sementara pengesahannya hanya dilakukan dalam waktu satu minggu. Menurutnya, ini rekor pembuatan UU tercepat yang pernah ada.

"Tiga hari proses pembahasan ini berlangsungnya secara tertutup, jadi kita tidak tahu apa yang dibahas oleh DPR dan pemerintah," kata Koordinator Bidang Konstitusi dan Ketatanegaraan Kode Inisiatif, Violla Reininda, saat dihubungi GATRA, Ahad malam lalu.

Violla menambahkan, hal tersebut berbuntut pada substansi UU itu sendiri. Apalagi, kata dia, naskah akademiknya yang hanya berjumlah 23 halaman saja tidak melontarkan secara komprehensif soal perubahan UU MK, terutama soal penambahan usia hakim konstitusi.

Dengan begitu, pemerintah dan DPR justru terlihat tidak memikirkan penguatan MK. Violla menyebut, *grand design* MK ke depan kurang jelas dan parahnya klausul yang dihasilkan berpotensi menimbulkan *conflict of interest*. "Dengan ini, maka bisa terlihat ada upaya pemerintah dan DPR untuk memberikan "pemanis" kepada kekuasaan kehakiman MK," dia membeberkan.

Violla menjelaskan, keputusan itu jelas bertentangan dengan konvensi internasional hakim atau *International Judges* yang menyebut bahwa hal-hal tentang perpanjangan masa jabatan itu tidak boleh berlaku mengikat bagi hakim yang menjabat. Menurutnya, hal tersebut sangat tergesa-gesa dan materinya pun berkutat di perpanjangan masa jabatan saja.

Pengajuan gugatan UU MK itu dilakukan bersamaan dengan momentum disahkannya *omnibus law* UU Cipta Lapangan Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Namun, Violla menegaskan bahwa gugatan itu tak hanya untuk mempersiapkan uji materi *omnibus law* itu, yang belakangan ditolak dan diujikan ke MK oleh banyak pihak. "Kalau dalam pengujian UU ini sebenarnya yang ingin kami sasar bukan cuma untuk perbaikan MK saja tapi memang lebih luas lagi untuk kepentingan publik secara lebih luas," dia menjelaskan.

HIDAYAT ADHININGRAT P. DAN ERLINA FURY SANTIKA

FACEBOOK.COM/VIOLLAREI

Violla Reininda

an lain di luar *judicial review*. Karena itu, kata Iqbal, selain *judicial review*, KSPI dan konfederasi pekerja lainnya juga akan mengambil langkah-langkah lain, seperti melanjutkan aksi-aksi konstitusional demi mengingatkan pemerintah, DPR, dan MK sendiri untuk memutuskan semua perkara yang berhubungan dengan pembatalan UU Cipta Kerja dengan seadil-adilnya. "Selain aksi, kita juga akan terus mendorong DPR untuk melakukan *legislative review*; revisi terhadap undang-undang," kata Iqbal.

KSPI terus berfokus pada substansi undang-undang dalam konteks *legislative review*. Karena itu, menurut Iqbal, aksi, lobi, dan juga penyampaian aspirasi publik harus meluas. Kalau aspirasi publik tidak diserap dan DPR tetap memuluskan undang-undang tersebut meski ada desakan *legislative review*, maka, kata Iqbal, DPR bukan hanya akan dianggap cacat prosedur tetapi juga cacat moral. "Hanya mementingkan dirinya sendiri, bukan mementingkan rakyat yang diwakilkan oleh mereka," ia memaparkan.

***

Meski sudah ditandatangani Presiden, UU Cipta Kerja masih menjadi polemik. Hal ini karena masih banyaknya kesalahan tipografi atau pengetikan dan ada beberapa pasal turunan yang tidak ada di dalam aturan tersebut meski menjadi rujukan di pasal selanjutnya. Beberapa pihak menilai kesalahan ini bisa mendorong opsi perbaikan melalui *legislative review* atau *executive review*.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Supratman Andi Agtas, menyatakan bahwa jika kesalahan sebatas terjadi secara redaksional maka perbaikannya bisa dikomunikasikan dengan pemerintah. "Kalau terkait substansi, mekanismenya bisa bermacam-macam. Tapi kalau hanya perbaikan redaksional, saya sependapat dengan Prof. Yusril. Bahwa itu sebenarnya tidak apa-apa langsung koordinasi saja antara pemerintah dan DPR untuk memperbaiki pasal rujukan," ungkap Supratman kepada GATRA.

DPR.GO.ID

"Kalau terkait substansi, mekanismenya bisa bermacam-macam. Tapi kalau hanya perbaikan redaksional, saya sependapat dengan Prof Yusril. Bahwa itu sebenarnya tidak apa-apa langsung koordinasi saja antara pemerintah dan DPR untuk memperbaiki pasal rujukan."

Supratman Andi Agtas

Supratman menilai kesalahan yang ada di naskah UU Cipta Kerja murni kesalahan pengetikan semata. Oleh karena itu tidak mengubah substansi dan roh dari beleid ini. Berdasarkan keterangan Supratman, UU Cipta kerja merupakan UU pertama yang diperbaiki setelah keluar dari Istana dan ditandatangani presiden.

"Tapi kalau [ada kesalahan pengetikan] sebelum presiden tandatangan, hampir semua kok UU seperti itu. Karena Mensesneg harus baca dulu. Jadi mekanisme yang namanya perbaikan typo dan sebagainya selalu dilakukan," tutur politisi Gerindra tersebut.

Pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zaenal Arifin Mochtar mengatakan, perubahan undang-undang pasca-persetujuan tidak boleh terjadi. Karena UU Nomor 12 Tahun 2011 dan UU Nomor 15 Tahun 2019 hanya memberikan kesempatan tujuh hari untuk penyesuaian teknis penyesuaian format dan tidak boleh lagi ada pasal yang diubah dan diutak-atik.

"Dengan segala hormat, saya ingin mengatakan bahwa itu mustahil salah ketik dan itu bukan hal yang sepele. Menurut saya, itu praktik dari gejala hapus-menghapus pasal yang terjadi pasca pengesahan. Jadi itu enggak bisa dianggap sepele karena itu pelanggaran formil yang sangat luar biasa," ia menjelaskan kepada Wahyu Wachid Anshory dari GATRA.

Zaenal mengingatkan, prosedural pembuatan UU penting untuk dijaga. Prosedural itu ada untuk menjaga *fairness* dari negara yang sedang berhadapan dengan warga. "Jadi tentu saja, menurut saya, jauh lebih baik ketika menggunakan aturan hukum yang ada, yaitu perppu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang), dibanding kemudian membuat logika baru yaitu menyilakan kepada Presiden dan DPR untuk melakukan perubahan," pungkasnya.

HIDAYAT ADHININGRAT P.,
M. ALMER SIDQI, DAN M. GURUH NUARY

PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Berlindung dari Godaan Cukong

Sponsor politik selalu hadir dalam setiap gelaran pesta demokrasi. Ongkos yang tinggi penyebab utama pemodal masuk gelanggang. Sekali terjerat, sulit lepas.

ANTARA FOTO / MOHAMMAD AYUDHA

Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solo nomor urut satu Gibran Rakabuming Raka (kiri)-Teguh Prakosa (dua kiri) dan nomer urut dua, Bagyo Wahyono (dua kanan)-FX. Supardjo

Dua pasangan calon (paslon) kepala daerah yang bertarung dalam hajatan demokrasi di Kota Surakarta alias Solo ini terbilang tipis dananya. Tercatat dalam Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), pasangan nomor urut 1 Gibran Rakabuming Raka-Teguh Prakosa dan nomor urut 02 Bagyo Wahyono-F.X. Supardjo (Bajo) ini bermodal kampanye tak sampai Rp1 miliar.

Dalam laporan tersebut, pasangan Gibran-Teguh melaporkan dana kampanye yang ada dalam rekening resmi, jumlahnya baru mencapai Rp650 juta. Itu pun sumbernya hanya dari kocek pribadi Gibran seorang. Sedangkan pasangan Bajo hanya Rp153.475.000. Sumber dana pribadi dari pasangan Bajo cuma menyumbangkan Rp36,6 juta dan sisanya berasal dari urunan perorangan.

Ketua Tim Pemenangan Bajo, Robert Hananto, mengatakan laporan dana kampanye Bajo telah dilaporkan ke KPU. Jumlah terbesar berasal dari sumbangan perorangan anggota organisasi Tikus Pithi Hanata Baris. "Memang kami iuran anggota, tiap anggota iuran Rp10.000 dan untuk pengurus Rp25.000. Tapi karena yang iuran dari seluruh anggota kami di Indonesia, maka totalnya jadi sebesar itu," ucap Robert.

GATRA/JONGKI HANDIANTO

Eddy Soeparno

Selama ini, anggota Tikus Pithi Hanata Baris memang menyumbang ke rekening yayasan. Dari yayasan ini kemudian disumbangkan untuk mendukung pasangan Bajo maju pada pilkada Kota Solo. "Memang mereka tidak mengharap apa-apa. Tapi mereka bersemangat agar pasangan Bajo bisa menang dalam pilkada," ucapnya.

Robert menambahkan bahwa sejauh ini peruntukan dana kampanye digunakan untuk memasang iklan di radio dan koran. Selain itu dana tersebut digunakan untuk konsumsi pada kegiatan kampanye Bajo. "Tapi biasanya untuk kampanye yang pertemuan saja. Kalau kampanye *door to door* biasanya uang pribadi dari relawan," ucapnya.

Bagyo Wahyono mengaku tidak tahu detail tentang sumbangan untuk kampanye pasangan Bajo. Namun, sejak awal mereka sudah berkomitmen tidak akan menerima sumbangan dari pihak mana pun. Atau tidak ada yang cukongi. "Ada yang *ngurusi* sendiri [dana kampanyenya]. Tapi yang jelas, kami sepakat tidak ada korelasi dengan siapa pun dan partai apa pun. Kami *pure* gotong royong dari anggota Tikus Pithi," ucapnya.

Sedangkan Ketua Tim Pemenangan Gibran-Teguh, Putut Gunawan, mengakui jika ada sumber dana selain dana pribadi dari paslon. Sumber dana tersebut dari partai pengusung, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan. "Laporan yang masuk, baru dari dana pribadi Gibran-Teguh dan dari partai. Kalau selebihnya saya belum terima laporan," ucap Putut.

***

Persoalan campur tangan cukong dalam helatan politik memang tak bisa dihindari. Praktik transaksional tersebut terjadi karena tingginya biaya politik. Keterbatasan pendanaan para paslon untuk bertarung dalam pemilihan membuat mereka gencar mencari sumber-sumber pendanaan lain.

Pelaksana tugas (Plt.) Juru Bicara KPK Bidang

Pencegahan, Ipi Maryati Kuding, mengatakan tingkat tingginya biaya politik ini juga telah dihitung oleh Litbang Kemendagri (2014), dan hasilnya bahwa untuk menjadi wali kota/bupati dibutuhkan biaya mencapai Rp20 miliar-Rp30 miliar, sedangkan untuk menjadi gubernur sebesar Rp20 miliar-Rp100 miliar.

Hal yang sama diungkapkan dari studi KPK (2015, 2017, 2018). Melalui wawancara mendalam yang dilakukan KPK, didapat data bahwa biaya pilkada sekelas bupati saja bisa mencapai Rp5 miliar-Rp10 miliar. Untuk menang idealnya calon harus memiliki dana Rp65 miliar. "Dari wawancara mendalam dengan seorang mantan bupati, didapatkan bahwa untuk menjadi bupati di Pulau Jawa biaya politik yang harus dikeluarkan mencapai Rp100 miliar," kata Ipi kepada Wahyu Wachid Anshory dari GATRA.

Ipi menjelaskan, bahkan biaya untuk menjadi kepala daerah jauh lebih besar jika dibandingkan dengan biaya menjadi anggota dewan yang hanya mencapai Rp300 juta-Rp6 milyar. Sementara itu, data LHKPN tentang calon kepala daerah (2017) memperlihatkan bahwa calon kepala daerah tidak akan mampu membiayai sendiri.

> "Daerah yang paling rawan ditunggangi [cukong] adalah yang mempunyai APBD besar dan sumber daya alam yang juga jumbo."
>
> **Arif Wibowo**

Karena itulah, KPK pada 2015, 2017, dan 2018 melakukan studi untuk mengidentifikasi potensi benturan kepentingan pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada). "Terutama terkait dengan penerimaan sumbangan. KPK pun menelaah lebih jauh sumber pendanaan pilkada, selain dari harta kekayaan calon kepala daerah," ujar Ipi.

Hasil dari telaah itu memunculkan angka di atas 70% calon kepala daerah mengaku didukung oleh sponsor. Bahkan kecenderungannya terjadi peningkatan di setiap ajang pilkada. Misalnya, pilkada 2015 sebesar 70,3%, pilkada 2017 sebanyak 82,6%, dan pilkada 2018 naik menjadi 82,3%.

Secara umum, bisa dikatakan calon kepala daerah bisa maju karena didukung dana dari sponsor. KPK menemukan bahwa benturan kepentingan berhubungan erat dengan profil penyumbang. "Donatur yang berasal dari pengusaha atau pebisnis mengharapkan balasan berupa kemudahan perizinan bisnis, kemudahan untuk ikut serta tender proyek

DOK.GATRA/DHARMA WIJAYANTO

Arif Wibowo

pemerintah, dan keamanan dalam menjalankan bisnis," ucapnya.

Lebih jauh, KPK juga menemukan bahwa sebagian besar cakada akan memenuhi harapan cukong tersebut ketika ia memenangkan pilkada. Hal itu terekam dalam survei KPK, bahwa dalam pilkada 2015, di antara para calon kepala daerah yang terpilih, sebanyak 75,8% akan memenuhi permintaan sponsor. Kemudian pada pilkada 2017 naik menjadi 82,2% dan pilkada 2018 meningkat menjadi 83,8%.

Sebagai upaya pencegahan korupsi, KPK sejak 2015 telah mengembangkan program Pilkada Berintegritas sebagai pendekatan edukasi. Upaya pendidikan politik juga dilakukan KPK dengan mengembangkan program Politik Cerdas Berintegritas (PCB) pada tahun 2016 untuk siswa dan mahasiswa.

Pada 2018, program ini kemudian direplikasi untuk para politisi. Untuk pilkada serentak 2020 yang akan dilaksanakan pada 9 Desember di sembilan provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten, KPK telah menyiapkan sejumlah program dan kegiatan kampanye sebagai bentuk edukasi, baik yang diselenggarakan secara mandiri maupun kolaborasi dengan sejumlah pihak.

***

Wakil Sekjen (Wasekjen) PDI Perjuangan, Arif Wibowo, mengatakan bahwa untuk mencegah masuknya cukong, partainya menerapkan sistem yang jelas. Pertama, soal transparansi dana kampanye. "Terutama tentang sumber-sumber pembiayaan kampanye, menyangkut teknis administratif," kata Arif kepada Muhammad Guruh Nuary dari GATRA.

Kedua, menyangkut dugaan tentang adanya cukong. Arif tidak membantah bahwa hal itu ada. "Oleh sebab itu, maka perlu dipikirkan sistem pemilihan yang murah biaya," ujarnya.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini juga menilai, munculnya cukong akibat dari mahalnya perjalanan demokrasi pemilihan kepala daerah, apalagi pemilu. "Kalau biaya murah maka ia akan memberikan insentif yang positif bagi proses politik yang terhindar dari *money politics*, terhindar dari politik biaya tinggi dan terhindar dari bandar dan cukong yang membiayai," ucapnya.

> "Permasalahan ini sistemik, sehingga tidak bisa hanya dibicarakan soal pengawasan saja. Perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap sistem kepemiluan dan kepartaian."
>
> **Eghi Primayoga**

Pasalnya, hingga kini biaya politik apakah untuk pemilu maupun pilkada terbilang mahal. "Itu jadi ruang untuk masuknya cukong. Membiayai, mengijon proyek sebelum si kandidat menang, dan seterusnya pasti akan terjadi," cetus Arif.

PDI Perjuangan sudah berupaya untuk mencegah masuknya cukong ke tubuh para calon kepala daerah dengan pengawasan sejak awal mereka dicalonkan. "Meskipun di lapangannya bisa jadi tidak terhindarkan, yang kita dorong adalah transparansi dan kalau ada sumbangan pihak ketiga harus bersifat tidak mengikat," katanya.

Dari 270 daerah yang akan menggelar pilkada, pastinya banyak daerah yang menjadi makanan empuk para cukong untuk bermain di dalamnya. "Daerah yang paling rawan ditunggangi [cukong] adalah yang mempunyai APBD besar dan sumber daya alam yang juga jumbo," katanya.

Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (Sekjen PAN), Eddy Soeparno, membeberkan bahwa cukong politik terbagi dalam dua bentuk. Pertama, datang di awal sudah mem-*backup* paslon, sehingga ketika maju pilkada sudah ada kelengkapan logistik yang kuat dan pendanaan yang kuat. "Mereka biasanya dari kalangan pengusaha agar usahanya bisa terproteksi atau ingin dikembangkan lebih lanjut," Eddy memaparkan kepada GATRA.

Kedua, model sponsor-sponsor yang hadir ketika sudah terlihat titik terang kemenangan dari salah satu pasangan calon. "Jadi mereka masuknya di tengah-tengah atau di penghujung dari perjalanan suatu pilkada. Dengan berbagai konsesi usaha, konsesi perizinan, dan lain-lain. Karena itu, dua bentuk itu yang selama ini terjadi," Eddy menambahkan.

Agar jauh dari penyimpangan, PAN ingin paslon berjuang berdasarkan kemampuan sendiri dan tidak memiliki ketergantungan kepada pihak ketiga. Partai juga melakukan wawancara mendalam dengan para calon kepala daerah dan selalu menanyakan soal pemberian dana dukungan dari pihak ketiga.

Di sini, partai tidak ingin para paslon mengikuti arus para cukong. "Dalam sesi wawancara itu misalnya calon gubernur, kami tanyakan siapa yang mendukung, apakah mereka ini masuk dalam pengaruh tanda petik pengusaha hitam, yang artinya me-

minta balas jasa," katanya.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Evi Novida Ginting Manik, mengatakan bahwa penerimaan sumbangan dana kampanye pasangan calon dalam pilkada merupakan hal yang lazim dan dibolehkan oleh undang-undang.

Hal tersebut juga telah diatur dalam ketentuan Pasal 74 Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016. Kemudian KPU mengatur secara teknis tentang sumbangan dana kampanye melalui Peraturan KPU (PKPU) Nomor 5 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2020 tentang dana kampanye pemilihan.

Evi menjelaskan, sumbangan dana kampanye paslon dapat berasal dari pasangan calon, partai politik, dan pihak lain yang sah secara hukum. Besaran sumbangan dana perseorangan paling banyak Rp75 juta sementara sumbangan yang berasal dari partai politik, pihak lain kelompok dan pihak lain berbadan hukum swasta paling banyak Rp750 juta selama masa kampanye. Selain itu, pemberi sumbangan dana kampanye harus berasal dari sumbangan yang jelas identitas dan asalnya.

Dalam catatan KPU, di pilkada 2020 ada temuan sebanyak 82% calon kepala daerah mendapatkan biaya dari sponsor. Hal itu akan dikonfirmasi KPU melalui laporan dana kampanye. Laporan tersebut merupakan pegangan KPU dalam menelisik sumber dan besaran biaya yang dipergunakan calon kepala daerah di pilkada.

Regulasi sejauh ini hanya memberikan kewajiban pelaporan mengenai dana selama kampanye. "Karena itu pasangan calon diwajibkan untuk membuka rekening khusus dana kampanye (RKDK) yang digunakan untuk menempatkan dana kampanye pasangan calon sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye," ujarnya kepada Muhammad Almer Sidqi dari GATRA.

***

Kehadiran pemodal atau cukong dalam pemilu maupun pilkada menjadi catatan serius pihak Indonesia Corruption Watch (ICW). Menurut peneliti ICW Eghi Primayoga, para paslon sulit menghindari para cukong karena ongkos politik yang mahal. "Jadi, para calon pasti membutuhkan sumber daya material yang besar untuk melakukan kampanye dalam proses pemilu atau pilkada. Sehingga mereka mau enggak mau akan terima sokongan dana dari para cukong," kata Eghi saat dihubungi wartawan GATRA Erlina Fury Santika.

Fenomena tersebut muncul di setiap gelaran pemilu atau pilkada. Pasti ada cukong yang bermain. Bahkan, partai politik tak semuanya mengetahui tentang adanya cukong yang membantu sang kandidat.

Ia memastikan setiap calon kepala daerah yang dicukongi pasti integritasnya mudah goyah. Calon yang menerima bantuan itu sudah tersandera sejak awal dan merasa punya utang budi kepada para pemberi dana. Dampaknya, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan akan dipertimbangkan apakah menguntungkan si pemberi dana atau tidak.

Eghi memberikan contoh, kepala daerah bisa memberi proyek, mempermudah izin pembangunan, atau mengalokasikan anggaran tertentu kepada para cukongnya. Jadi jelas, kepala daerah seperti itu sudah rentan melanggengkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Ia menuturkan, bahwa cukup sulit untuk lepas dari jerat cukong dalam pesta demokrasi akbar tersebut. "Permasalahan ini sistemik, sehingga tidak bisa hanya dibicarakan soal pengawasan saja. Perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap sistem kepemiluan dan kepartaian," ia menambahkan.

GANDHI ACHMAD
DAN NOVITA RAHMA (SOLO)

ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK A

Evi Novida Ginting Manik

EKONOMI ISLAM

EKONOMI ISLAM INDONESIA NAIK KELAS

INDIKATOR EKONOMI ISLAM GLOBAL INDONESIA PADA 2020/2021 NAIK KE PERINGKAT KEEMPAT DALAM LAPORAN DINARSTANDARD. PENCAPAIAN ITU DIPEROLEH DENGAN MENYERTAKAN KALKULASI DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP EKONOMI ISLAM. KIAN TERBUKA JALAN UNTUK MENJADI PRODUSEN UTAMA HALAL GLOBAL DI 2024?

DinarStandard telah merilis State of the Global Islamic Economy Report (SGIER) 2020/2021. Dalam laporan itu disebutkan, pada 2019 porsi belanja muslim mencapai US$2,02 triliun, atau naik 3,2% dibandingkan pada 2018. Belanja itu ditopang oleh sektor makanan halal, farmasi, kosmetik, fasyen, media rekreasi dan wisata dalam ekosistem industri halal. Sementara itu, nilai aset keuangan Islam pada 2019 mencapai US$2,88 triliun.

Pada 2020, pengeluaran muslim global diperkirakan anjlok 8% berdasarkan sektor-sektor yang menopang ekonomi Islam. “Semua sektor, kecuali travel, diperkirakan dapat kembali ke level pertumbuhan sebelum pandemi hingga akhir 2021. Pengeluaran muslim diprediksi bisa mencapai US$2,4 triliun pada 2024 berdasarakan tingkat pertumbuhan kumulatif (CAGR) lima tahun, yaitu 3,1%,” kata CEO dan Managing Editor DinarStandard, Rafi’uddin Shikoh, melalui *live*

GATRA/ FRITZ PELENKAHU

GATRA/ EVA AGRIANA ALI

Peluncuran The State of Global Islamic Economy Report 2020/21 di Hotel Raffles, Jakarta

hybrid conference peluncuran SGIER 2020/2021 pada Selasa, 17 November lalu, di kawasan bisnis Mega Kuningan, Jakarta Selatan.

Berbeda dengan laporan yang dikeluarkan DinarStandar tahun-tahun sebelumnya, indikator pencapaian ekonomi Islam tahun ini menyertakan prediksi dampak pandemi Covid-19. Selain berimbas pada kestabilan ekonomi dunia, pandemi juga ikut memengaruhi pertumbuhan ekonomi Islam pada satu sisi, namun di sisi lain mendorong negara-negara mengakselerasi transformasi digital, mengubah rantai suplai global, dan memaksa pemerintah fokus pada keamanan pangan sekaligus investasinya.

DinarStandard mengungkapkan, Covid-19 memukul enam sektor yang masuk indikator pemeringkatan SGIER. Travel menjadi sektor paling terimbas pandemi dengan pertumbuhan hingga minus 70%. Disusul berturut-turut oleh sektor farmasi (-6,9%), media rekreasi (-3,7%), fesyen muslim (-2,9), kosmetika (-2,5%), dan makanan (-0,2%).

Pasca-pandemi, ekonomi Islam disebut akan terus tumbuh berdasarkan sejumlah indikator, di antaranya jumlah populasi muslim yang terus bertambah, nilai-nilai keislaman yang menjadi pola konsumsi baru masyarakat, dan makin tingginya minat negara-negara lain menjadikan kebijakan halal produk dan layanannya memikat warga muslim dunia.

Di tengah situasi pandemi ini, peringkat teratas SGIER kedelapan masih dipegang oleh Malaysia. Arab Saudi berhasil naik peringkat ke tempat kedua, yang diikuti berturut-turut oleh UEA, Indonesia, dan Yordania.

Negara pendatang baru yang berhasil merangsek ke 15 besar adalah Nigeria (ke-13), Sri Lanka (ke-14), dan Singapura (ke-15). Sementara itu, Brunei Darussalam, Sudan, dan Bangladesh tergelincir dari 15 besar.

Sejumlah strategi dilakukan oleh negara-negara Islam sejak tahun lalu. Indonesia mengeluarkan UU Produk Halal, Arab Saudi juga mengeluarkan regulasi produk halal. Indonesia dan Filipina juga menjalin kerja sama meluaskan perdagangan produk halal, sama seperti yang telah dilakukan antara Malaysia dan Jepang.

Di sektor keuangan syariah global, Pakistan, Qatar, dan Kuwait mengumumkan rencana kebijakan baru terkait itu. Sementara itu, pada sektor pariwisata, kendati turun drastis akibat pandemi, Arab Saudi tetap akan menggelontorkan dana US$4 miliar untuk mendukung visi turisme 2030 dengan fokus pada pengembangan teknologi pariwisata.

Covid-19 juga mendorong 57 negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang sebelumnya bersandar pada impor menjadi memprioritaskan ketahanan pangannya. UEA dan Arab Saudi, misalnya, beralih untuk mengembangkan swasembada pangannya. Indonesia dan Saudi Arabia juga mendorong farmasi lokalnya.

Laporan global untuk krisis pangan mengungkapkan Covid-19 mengancam krisis pangan dunia. Sebanyak 265 juta jiwa terancam kelaparan, di mana mayoritas berasal dari negara-negara OKI. Bank Pembangunan Islam (IDB) menggelontorkan US$2,3 juta paket bantuan kepada 27 negara OKI dalam mengendalikan Covid-19.

***

Laporan yang baru dirilis DinarStandard menjadi acuan informasi dan analisis terkini bagi Indonesia dalam pengembangan ekonomi Islam ke skala global. Antar negara dapat mengetahui posisinya dalam perekonomian Islam dunia, termasuk potensi serta kebutuhan yang diperlukan untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

"Saya bersyukur, di tengah pandemi seperti sekarang, tingkat GIE 2020/2021 Indonesia berhasil menduduki peringkat keempat. Naik kelas dari peringkat kelima pada 2019/2020 dan juga naik dari peringkat sebelumnya yang pernah ada di posisi ke-10," kata Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat memberikan sambutan virtual dalam peluncuran laporan SGIER 2020/2021 ini dari Istana Wakil Presiden, Jakarta.

Menurut laporan SGIER 2020/2021, ekonomi Islam Indonesia tidak hanya semakin besar, tapi juga menunjukkan peranan inovasi di bidang ekonomi Islam mulai dari sektor makanan, pariwisata, fesyen, kosmetik, farmasi, dan media rekreasi. Hampir dalam setiap indikator penilaian tersebut Indonesia masuk 10 besar.

Pemerintah, Ma'ruf melanjutkan, telah membuat ekosistem yang membuat peluang bagi tumbuhnya ekonomi Islam disertai berbagai insen-

tif yang mempermudah dunia industri dan investasi di Indonesia dalam bidang infrastruktur, produk dan jasa halal. "Kenaikan peringkat ini harus kita maknai agar dapat menjadikan Indonesia sebagai produsen halal dunia dan penggerak ekonomi halal nasional," ia menambahkan.
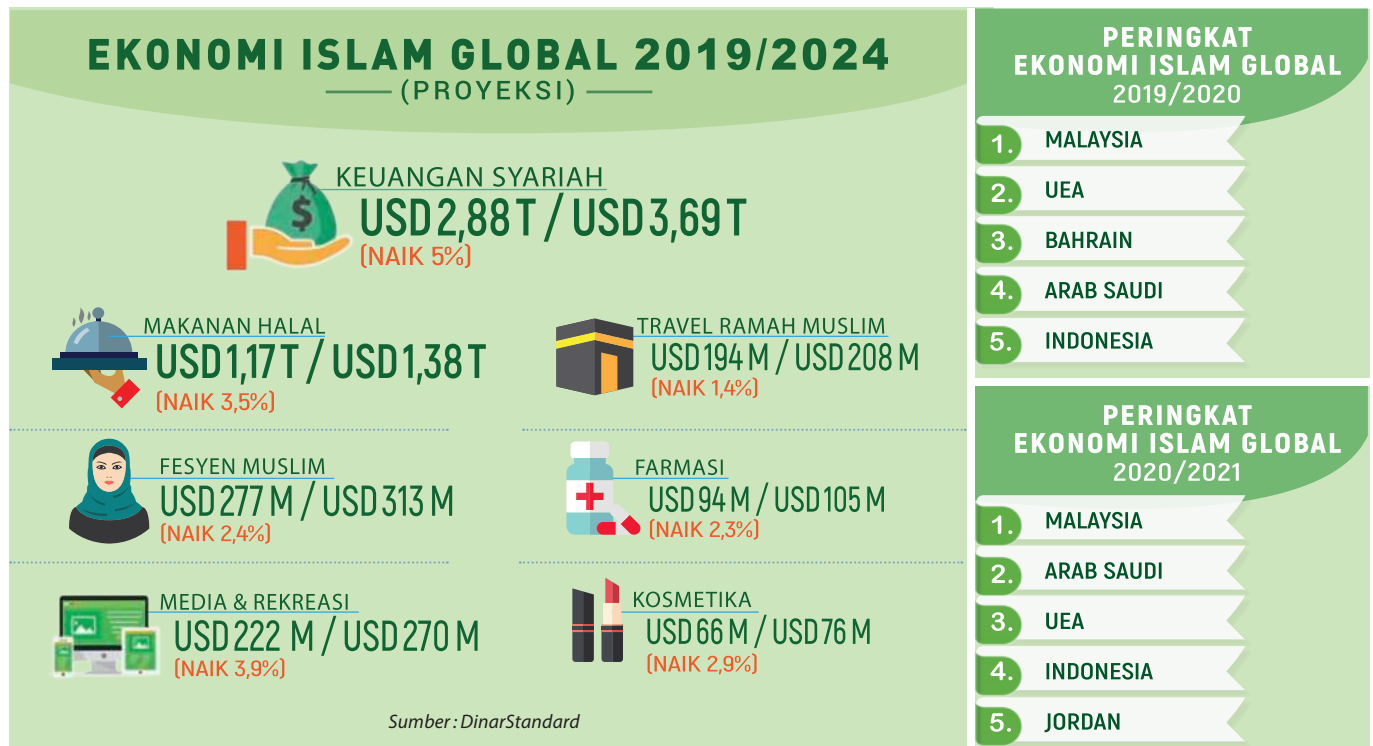
Saat ini, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, menurut Ma'ruf, fokus pada empat hal: pengembangan industri produk halal, keuangan syariah, optimalisasi dana sosial syariah, dan penumbuhan serta peningkatan kapasitas bisnis syariah termasuk dalam skala UMKM.

"Saya berharap, capaian ini juga menjadi penyemangat dari seluruh pemangku kepentingan dalam merealisasikan program-program ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Semoga mimpi Indonesia menuju *global halal hub* dan industri halal dunia serta menjadikan keuangan syariah sebagai sumber perekonomian baru pasca pandemi dapat terwujud," ia menjelaskan.

Tentang posisi Indonesia yang mampu naik ke peringkat keempat, Rafi melihat pertumbuhan makanan halal di Indonesia menunjukkan progres sangat menjanjikan. Hal ini dibuktikan dengan masuknya Indonesia dalam 10 besar negara tujuan investasi keamanan dan rantai pasokan pangan. "Padahal pada tahun sebelumnya, posisi Indonesia tidak setinggi ini [masuk 10 besar]. Tidak seperti sekarang," ucapnya.

Berdasarkan hasil riset, untuk makanan halal, meski ikut terimbas Covid-19 dan mengalami penurunan 0.2%, Indonesia menunjukkan pertumbuhan positif pada dua kuartal terakhir. Kendati dari sisi ekspor menunjukkan penurunan, sektor pertanian memperlihatkan pertumbuhan positif.

***

Kinerja perdagangan Indonesia ke negara-negara OKI surplus US$2,2 miliar sepanjang Januari-Juli 2020. Ekspor tercatat US&$10,94 miliar, lebih tinggi daripada laju impor negara-negara OKI ke Indonesia yang mencapai US$8,77 miliar.

> "Semoga mimpi Indonesia menuju *global halal hub* dan industri halal dunia serta menjadikan keuangan syariah sebagai sumber perekonomian baru pasca pandemi dapat terwujud."
>
> **Ma'ruf Amin**

Produk pertanian menyumbangkan porsi ekspor ke negara-negara OKI sebesar US$2,6 miliar atau 25% dari total ekspor Indonesia ke pasar tersebut. Ekspor makanan mencapai USE4,16 juta, surplus US$280,89 juta lebih dari nilai impor negara-negara OKI ke Indonesia sebesar US$173,27 juta.

Ekspor kosmetik tercatat US$30,32 juta, sementara impor produk kosmetik US$10,23 juta. Surplus sektor ini mencapai US$20,09 juta. Ekspor farmasi ke negara-negara OKI juga surplus dengan nilai US$31,31 juta, sedangkan impor sebesar US$25,81 juta.

Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengatakan, produk halal memiliki peranan penting dalam neraca perdagangan Indonesia. "Industri halal memang memiliki peran yang cukup signifikan atas performa neraca perdagangan Indonesia," ujar Agus dalam webinar "Indonesia Menuju Pusat Produsen Halal Dunia" pada akhir Oktober silam. .

OKI sendiri terdiri dari 57 negara dengan mayoritas penduduk muslim, atau sekitar 1,86 miliar jiwa atau 24,4% dari total populasi dunia. Kendati demikian, Indonesia belum menjadi produsen utama produk-produk halal di dunia. Indonesia masih kalah jauh dibandingkan dengan negara jiran Malaysia, yang menempati hampir semua peringkat utama dalam penilaian GIE.

Agus berharap, Indonesia bisa menjadi pemain industri halal terbesar dunia. Total jumlah penduduk 267 juta atau 87% dari populasi menjadikan Indonesia makin seksi sebagai pasar dunia bagi produk-produk halal.

GATRA/ EVA AGRIANA ALI

PELUANG INVESTASI PEMERINTAH

SEKTOR TERDAMPAK COVID-19
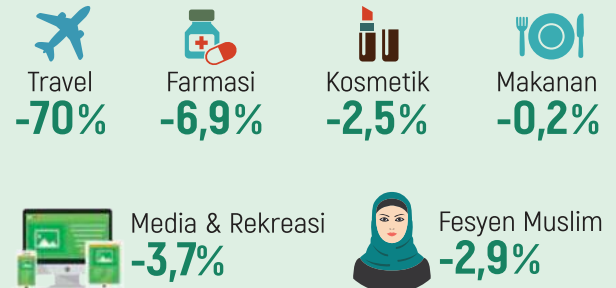
Sumber: DinarStandard

Untuk itu, perlu kerja sama seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, swasta, hingga masyarakat.

"Meningkatkan pangsa pasar produk halal, sekaligus menjadikan Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia merupakan hal yang cukup kompleks. Untuk mencapai tujuan ini diperlukan kerja sama yang erat antara pemerintah, swasta, BUMN, organisasi kemasyarakatan, dan publik secara umum," tuturnya.

Kendati memiliki peluang besar di ekonomi syariah, Indonesia belum bisa merealisasikannya. Direktur Riset CORE Indonesia, Piter Abdullah Redjalam, menyebut karena masterplan dan peta jalan ke arah ekonomi syariah belum jelas meski sudah ada KNKS dan lembaga syariah lainnya.

"Secara lebih besar, perencanaan terintegrasi dan komprehensif dari sisi moneter, fiskal, dan sektor riil untuk mengoptimalkan potensi di ekonomi syariah masih sangat minim. Kita belum punya itu," kata Piter kepada GATRA.

Meski sistem keuangan Indonesia terus tumbuh besar, kontribusi keuangan syariah masih sangat kecil. Salah satu masalah yang diungkapkan Piter adalah masih belum selesainya persoalan di sistem keuangan konvensional yang mendistorsi keuangan syariah.

"Suku bunga bank konvensional yang besar membuat keuangan syariah harus putar otak menawarkan imbal hasil yang jauh lebih menarik bagi masyarakat. Ini saja sudah melanggar konsep syariah. Keuangan syariah kita masih berpikir bagaimana memikat dengan imbal hasil tinggi. Ini akan membuat masyarakat kembali ke bank konvensional. Hal-hal ini belum kita kaji," Piter menjelaskan.

Rencana pemerintah yang akan membuat *holding* bank BUMN syariah juga dinilai Piter tak serta merta jadi jawaban. Apalagi, konsep masyarakat di Indonesia masih terpaut syariah adalah urusan agama, surga-neraka. Padahal di negara-negara lain, konsep usang itu sudah ditinggalkan. "Semua orang, apa pun agamanya, bisa menggunakan bank syariah, karena bank syariah menawarkan sistem yang lebih baik dari konvensional," ia menambahkan.

Demikian halnya dengan produk syariah dan halal. Pilhan konsumen pada produk syariah bukan pada ketakutan akan ajaran agama, tapi pada konsep lebih baik yang ditawarkan syariah.

Tak hanya sengkarut masalah sistem keuangan syariah di Indonesia yang belum rampung. Sertifikasi halal dari Indonesia juga tak menjadi rujukan negara lain mendaftarkan produk halalnya di lembaga milik Indonesia. "Sistem sertifikasi halal kita belum terbangun baik. Selama ini kan masih dipegang MUI, padahal sudah tidak lagi. Persoalan ini saja kita belum beres," kata Piter.

Chairman Indonesia Halal Lifestyle Center yang menginisiasi peluncuran laporan SGIE 2020/2021 DinarSrandar ini di Indonesia mengatakan, kenaikan peringkat sebagai dampak pengembangan berbagai sektor ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia akan kian membuka jalan terhadap target yang pernah ditetapkan pemerintah untuk menjadi pusat produksi produk halal dunia pada 2024. "Tentunya kita tidak ingin dikenal hanya sebagai konsumen atau importir besar saja," ujarnya.

FITRI KUMALASARI

EKONOMI ISLAM

MASIH MENUNGGU UNIT

SETELAH PENGGABUNGAN BANK SYARIAH ANAK USAHA BANK-BANK PELAT MERAH, UNIT USAHA SYARIAH (UUS) DI SEJUMLAH BPD JUGA DIDORONG UNTUK MELEPASKAN DIRI DARI INDUKNYA LALU BERGABUNG DALAM ENTITAS BINIS BARU. PEMILIK MODAL BELUM BERSIKAP.

Pelayanan di bank BJB Syariah

Aset keuangan sektor industri syariah di Indonesia masuk lima besar dunia menurut Global Islamic Finance Report 2018, dan nilai aset industri keuangan syariah tumbuh 20,61% secara tahunan (*year on year* -yoy) menjadi Rp1.639,08 triliun per Juli lalu. Namun ini hanya setara dengan *market share* 9,68% terhadap industri keuangan nasional.

"Masih kecil," kata Kepala Eksekutif Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Hoesen. "Karena selama ini tenaga SDM yang bekerja di ekonomi syariah masih sangat terbatas."

Memang ada ironi di sini. Sebagai negeri dengan jumlah penduduk

SYARIAH BPD

BJBSYARIAH.CO.ID

muslim terbesar di dunia, Indonesia memang belum bisa menyamai pencapaian negara Islam lain seperti Malaysia, Bahrain, UEA, dan Arab Saudi dalam pengembangan sektor syariah ini.

Ironisnya, menurut OJK, dengan penduduk muslim mencapai 87,18% dari total penduduk, tingkat literasi masyarakat tentang keuangan syariah masih berada di angka 8,93%. Industri keuangan syariah di Tanah Air pun kalah bersaing karena banyak faktor.

"Arah produk syariah Indonesia berorientasi pada sektor retail seperti fesyen dan makanan. Sementara di negara seperti Arab Saudi, Iran, dan Malaysia sudah mulai merambah ke banyak sektor seperti keuangan dan investasi," ucap CEO Alami Sharia, Dima Djani.

Masih belum tergarapnya sektor syariah membuat pemerintah mendorong Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah dunia pada 2024. Pemerintah lantas membentuk Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Ketuanya Presiden Joko Widodo dan ketua hariannya Wakil Presiden Ma'ruf Amin, sedangkan Menteri Keuangan Sri Mulyani ditugaskan menjadi sekretaris.

Lagkah konkret pun dimulai, di mana pada Oktober lalu dimulai penggabungan bisnis di bidang keuangan syariahnya, yaitu merger PT Bank BRIsyariah (BRIS) Tbk., PT Bank Syariah Mandiri (BSM), dan PT Bank BNI Syariah (BNIS).

Dengan penggabungan ini, kemungkinan bagi bank hasil merger untuk menjadi bank syariah kategori bank umum kegiatan usaha (BUKU) 4 dengan modal inti di atas Rp30 triliun akan sangat terbuka. Adapun jika

merujuk laporan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), laporan keuangan tiga bank syariah itu hingga semester I 2020 mencapai Rp214,74 triliun.

"Integrasi ini bisa membawa nama Indonesia ke kancah global sebagai pusat ekonomi syariah dunia," ucap Ketua Project Management Office Integrasi dan Peningkatan Nilai Bank Syariah BUMN sekaligus Wakil Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., Hery Gunardi.

***

Dimulainya penggabungan bank syariah milik perbankan BUMN diharapkan juga bisa segera mendorong terwujudnya penggabungan beberapa unit usaha syariah (UUS) yang dimiliki Bank Pembangunan Daerah (BPD), yang digulirkan sejak 2016.

Merger ini juga menjadi jalan keluar agar biaya *spin-off* atau pemisahan unit usaha syariah dari beberapa BPD lebih hemat sekaligus memenuhi UU Perbankan Syariah Nomor 21/2018 yang mengharuskan UUS untuk *spin-off* selambat-lambatnya 2023.

"Rencana merger UUS BPD Syariah akan menghasilkan kapitalisasi yang cukup besar dan diharapkan akan menjadi Bank Umum Syariah (BUS) yang sehat dan kuat," kata Ketua Tim Pemisahan sekaligus pengurus Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), Hanawijaya.

Pria yang juga menjabat sebagai Direktur Bisnis Ritel dan Unit Usaha Syariah Bank Jateng itu menyebut, rencana merger UUS BPD Syariah merupakan arahan dan pemikiran OJK yang disampaikan kepada

DOK.OJK

Hoesen

Asbanda untuk mempertimbangkan dan mengkaji kemungkinan terkait marger tersebut.

Sejak awal, rencana merger ini akan melibatkan 13 UUS yang berasal dari BPD Sumut, Jambi, Riau, Sumsel Babel, DKI, Jateng, Yogyakarta, Jatim, Kalsel, Kalbar, Kaltim, Sulselbar, dan Nagari Sumbar, serta satu BUS yakni Bank Jabar Banten Syariah (BJBS). Jumlah ini sekitar setengah dari total anggota Asbanda yang sebanyak 27 BPD.

Sejauh ini, konsep kajian yang telah dilakukan Asbanda, sebagai entitas penerima atau *survivor entity* adalah BJBS karena satu-satunya yang berstatus BUS. Mekanismenya yakni BJBS menerbitkan *bond* yang dibeli oleh bank umum konvensional (BUK) yang memiliki UUS dan dikonversi menjadi penyertaan modal.

Mengacu pada data yang dirilis OJK periode Juni 2020, rencana merger UUS BPD Syariah akan menghasilkan aset sebesar Rp31,75 triliun, pembiayaan sebesar Rp22,67 triliun, jumlah dana pihak ketiga (DPK) Rp18,60 triliun, dan total modal Rp4,69 triliun. Dengan demikian akan lahir bank baru yang bisa masuk kategori BUKU 3.

"Dengan kapitalisasi yang cukup besar tersebut, akan membuat Bank Umum Syariah hasil merger menjadi bank yang sehat dan kuat sehingga akan sangat optimis untuk naik ke BUKU 3," kata Hanawijaya. Bank BUKU 3 adalah bank yang memiliki modal inti Rp5 triliun-Rp30 triliun.

Namun, hasil analisis dan asesmen OJK serta beberapa lembaga dengan mempertimbangkan skala ekonomis, hanya sekitar empat UUS yang siap untuk *spin-off* menjadi BUS. Pasalnya, aturan menyebutkan bahwa untuk bisa lepas dari induknya, UUS paling tidak harus memiliki modal sebesar Rp1 triliun.

Tapi ini diyakini tidak menjadi penghalang niatan merger. POJK tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemisahan Unit Usaha Syariah memungkinkan UUS untuk melakukan merger tanpa harus masing-masing melakukan *spin-off* terlebih dahulu.

"Dalam beberapa kesempatan, kami telah menyampaikan kajian terkait penundaan *spin-off*. OJK juga telah mengantisipasi dengan mengeluarkan ketentuan relaksasi dalam menghadapi kewajiban *spin-off* seperti *platform sharing* dan lainya," Hanawijaya menjelaskan.

Merujuk kepada UU Nomor 21 Tahun 2008, tata cara pemisahan UUS belum diatur secara spesifik. Pasal yang ada, semata menekankan batas waktu pemisahan maksimal 15 tahun sejak diundangkan dan apabila aset UUS telah mencapai 50% dari aset induknya.

Sementara perkembangan proses *spin-off* UUS sejauh ini sangat beragam, tergantung tiap-tiap bank. Ada beberapa bank yang memilih melakukan konversi seperti Bank Nagari

dan Bank Riau-Kepri. Beberapa UUS BPD yang lain memutuskan tetap di jalur *spin-off* mandiri.

Di sisi lain, hingga saat ini secara legal formal belum ada kesepakatan antara 13 UUS BPD dalam melakukan merger. Penghambat utamanya, pemilik saham BPD -yang tak lain pemerintah daerah setempat--juga belum bermufakat untuk melepas usaha syariahnya.

Tentang persoalan ini, Hanawijaya mengaku bahwa strategi yang telah ditempuh Asbanda adalah dengan berupaya untuk menjadikan rencana merger UUS sebagai program nasional seperti halnya merger BUS Himbara. Asbanda juga telah mengomunikasikannya dengan *stakeholder* terkait, dari OJK, KNEKS, Kementerian Dalam Negeri, hingga staf Wapres.

yang harus dihadapi pemerintah," ia menjelaskan kepada Qonita Azzahra dari GATRA.

Selain itu, BPD di setiap daerah sudah sangat menguasai *market share* di daerahnya sendiri. Karenanya, jika 13 UUS dan satu BUS tersebut dipaksa untuk lepas dari induknya dan keluar dari daerah mereka masing-masing, Yusuf khawatir, malah bakal sulit berkembang.

Terlebih, jika kemudian bank hasil merger akan ditempatkan dan dipimpin oleh satu bank entitas penerima dari daerah tertentu. Padahal, bank tersebut tidak begitu memahami kondisi pasar dari BPD lainnya. Pada akhirnya, kekuatan BPD di tiap-tiap daerah juga akan sangat berkurang.

Adapun pasar di daerah yang tadinya dimiliki oleh UUS dan induknya yang merupakan BPD konversikan saja menjadi bank syariah. Dengan langkah itu, pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini yakin, kekuatan BPD akan semakin besar dan lebih aman, karena telah memiliki pasarnya sendiri.

Hitung-hitungan Yusuf, kemungkinan bank hasil merger hanya akan masuk ke dalam BUKU 2, dengan modal inti antara Rp1 triliun dan Rp5 triliun. Sebab, sampai saat ini, kebanyakan bank yang akan dimerger hanya tergolong dalam BUKU 1 dan 2.

FLORA LIBRA YANTI DAN ANDIK SISMANTO (SEMARANG)

"Kami telah menyampaikan kajian terkait penundaan *spin-off*. OJK juga telah mengantisipasi dengan mengeluarkan ketentuan relaksasi dalam menghadapi kewajiban *spin-off*."

Hanawijaya

DOK.BANK JATENG

Menggabungkan unit usaha syariah memang mudah di atas kertas, namun menurut Direktur Eksekutif Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS), Yusuf Wibisono, rencana ini bisa terhambat berbagai kendala.

"Kultur budaya di tiap daerah kan beda. Kondisi pasar atau *market share* dari masing-masing provinsi tersebut sudah pasti sangat berbeda. Ini menurut saya tantangan terberat

konvensional, akan secara otomatis jatuh seluruhnya di tangan BPD konvensional.

Karena itulah, menurut Yusuf, ketimbang melakukan merger, akan lebih baik bagi UUS dan induknya untuk di-

SAPTA NIRWANDAR
Chairman Indonesia Halal Lifestyle Center

SEMUA SEKTOR PUNYA PELUANG JADI NOMOR SATU

DALAM TREN NEGATIF EKONOMI HALAL GLOBAL AKIBAT PANDEMI COVID-19, INDONESIA NAIK PERINGKAT. MODAL SEBAGAI PASAR TERBESAR PRODUK HALAL TERBESAR DUNIA HARUS DIIMBANGI TARGET MENJADI PRODUSEN DAN PENGEKSPOR NOMOR WAHID.

Pencapaian Indonesia menjadi peringkat empat dalam daftar negara-negara dengan ekosistem halal terbesar dunia disambut baik oleh banyak kalangan.

Wakil Presiden RI K.H. Ma'ruf Amin menyambut baik pencapaian, seperti tercatat dalam State of the Global Islamic Economy Report (SGIER) 2020/2021 itu, dan menyebutnya sebagai bagian dari optimisme menggerakkan ekonomi Islam Indonesia, baik dalam skala nasional maupun global.

Seiring dengan itu, Chairman Indonesia Halal Lifestyle Center (IHLC), Sapta Nirwandar, yang menginisiasi dan bekerja sama dengan DinarStandard dalam peluncuran SGIER itu di Indonesia, menempatkan pencapaian sebagai bagian dari progres upaya pemerintah untuk memenuhi target menjadikan Indonesia sebagai produsen ekonomi halal terbesar dunia pada 2024.

Seperti apa peluang dan tantangan Indonesia berdasarkan laporan itu? Untuk dapat mencapai target tersebut, Wartawan GATRA Bambang Sulistiyo, Fitri Kumalasari, dan pewarta foto Eva Agriana Ali mewawancarai Sapta Nirwandar di Hotel Rafles Jakarta, kawasan bisnis Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, 17 November 2020 lalu. Berikut petikannya:

GATRA/ EVA AGRIANA ALI

Bagaimana pandangan umum IHLC terhadap SGIER 2020/2021 DinarStandard ini?

Pertama yang menarik perhatian saya adalah naiknya Indonesia ke peringkat empat dalam daftar negara-negara dengan ekosistem ekonomi halal berdasarkan Global Islamic Economy Indicator (GIEI). Tahun sebelumnya, kita ada di peringkat lima. Sebelumnya lagi, malah di peringkat sepuluh. Pencapaian itu kian membuka peluang Indonesia untuk mengimbangi potensinya sebagai pasar terbesar ekonomi Islam dengan target menjadi produsen dan pengekspor produk ekonomi Islam terbesar dunia, baik dari sisi industri produk halal maupun keuangan Islam.

Seperti telah kita ketahui, Wakil Presiden Ma'ruf Amin beberapa waktu lalu menargetkan Indonesia menjadi produsen halal industri terbesar di dunia pada 2024.

Apa isu yang menarik di balik kenaikan peringkat Indonesia itu?

Ada idiom yang menyebut *every cloud has a silver lining*. Selalu ada hikmah atau hal menguntungkan dari setiap situasi sulit. Kenaikan peringkat itu ada di periode ketika ekonomi Islam dan ekonomi konvensional global tentunya, terpukul oleh pandemi Covid-19. Dalam SGIER 2020/2021 ini, pandemi diperkirakan menurunkan angka pertumbuhan ekonomi hingga minus 8% dan dalam tren negatif itu, Indonesia naik peringkat.

Bahkan menurut salah seorang panelis saat diskusi peluncuran *report* ini, peringkat Indonesia bisa saja lebih tinggi satu level lagi jika *report* ini mempertimbangkan informasi soal peningkatan pertumbuhan sektor pertanian dan farmasi Indonesia di masa pandemi. Saya melihat ada sinyal resiliensi ekonomi Islam Indonesia di tengah pandemi

dengan kenaikan peringkat itu.

Dalam *report-report* sebelumnya, Indonesia kerap ditabalkan sebagai pasar ekonomi Islam atau pasar industri halal terbesar dunia. Bagaimana dengan tahun ini?

Dalam *summary report* memang tidak tercantum informasi itu, mungkin karena ada perubahan sistematika penyusunan *report*. Namundalam presentasi virtualnya, Raffi-Uddin Shikoh selaku CEO DinarStandard yang menyusun laporan ini menyebut posisi Indonesia masih sebagai pasar terbesar ekonomi Islam global.

Data dalam *road map* industri halal Indonesia dua tahun lalu juga masih di posisi yang sama. Pada 2017, konsumsi Indonesia terhadap produk halal sebesar US$218,8 miliar dan diprediksi akan meningkat menjadi US$330,5 miliar pada 2025.

Apa saja sektor ekonomi Islam yang menopang kenaikan peringkat Indonesia dalam SIEGR tahun ini?

Hampir pada setiap indikator, Indonesia masuk dalam daftar 10 besar. Misalnya untuk finansial Islam, kita ada di peringkat tujuh dari sepuluh besar negara dengan aset finansial Islam, dengan nilai US$99,2 miliar. Peringkat tertinggi ditempati Iran dengan nilai aset US$698,2 miliar.

Lalu contoh lain, di sektor makanan halal. Untuk pertama kalinya, Indonesia masuk lima besar negara-negara dengan peringkat GIEI tertinggi. Tepatnya di peringkat empat, di bawah Malaysia, Singapura, UAE, di atas Turki. Ini sinyal menarik karena biasanya sektor ini didominasi oleh negara-negara seperti Brazil dan Australia.

Namun jika dilihat dari daftar lima besar pengekspor *halal food* ke negara-negara OKI, Brazil masih di peringkat satu dengan nilai ekspor US$16,2 triliun dan Indonesia ada di peringkat pertama konsumen *halal food* di antara negara-negara OKI dengan nilai pasar US$144 miliar.

Industri fesyen muslim menjadi salah satu sektor yang bisa mendukung Indonesia sebagai produsen halal

Apakah dampak pandemi Covid-19 akan memengaruhi target Indonesia menjadi produsen halal industri terbesar dunia pada 2024?

Sekarang, dalam situasi pandemi, kita ada di peringkat empat. Untuk menjadi produsen halal ekonomi terbesar dunia, Indonesia untuk amannya harus menempati *ranking* satu untuk masing-masing sektor halal, meliputi makanan, keuangan, fesyen, farmasi, kosmetik, media rekreasi, dan turisme.

Dalam *report* ini disebutkan rata-rata semua sektor mengalami kenaikan atau stabilitas, seperti sebelum pandemi pada akhir 2021 dan sampai 2024 diprediksi belanja industri halal global akan mencapai US$2,4 triliun pada Tingkat Pertumbuhan Tahunan Kumulatif (CAGR) 3,1%.

Kita tidak boleh kehilangan optimisme meski tetap harus mempertimbangkan waktu pemenuhan target yang walaupun masih ada empat tahun dari sekarang, tetapi dengan memperhitungkan stabilitas pertumbuhan pandemi, jadi tinggal tersisa dua tahun saja waktu efektif.

Apakah mungkin? Mengapa tidak. Dalam Al-Qur'an Surat Yasin

GATRA/ JONGKI HANDIANTO

industri terbesar dunia pada 2024

Ayat 82, orang Islam akrab dengan kalimat "*kun fayakun*"yang lazimnya dipahami sebagai jaminan pertolongan Allah kepada umatnya apabila Dia menghendaki. Kita dapat mencapai itu dengan ikhtiar, ikhlas, dan bertawakal kepada Allah.

Ada yang bilang target itu sebagai *gimmick* motivasional yang ditetapkan untuk memicu semua *stakeholder* industri halal Indonesia untuk bekerja lebih keras dan lebih sinergis untuk memperoleh hasil besar. Tentu saja, ini bukan sembarang *gimmick*,karena di dalamnya ada pertimbangan terukur. Misalnya, dari sisi data, ada sejumlah potensi dan modal ekonomi halal Indonesia yang mungkin belum jadi *entry* analisis dalam *report* ini. Contohnya, terkait data aset dana sosial syariah Indonesia yang *size*-nya begitu besar dan pencapaian-pencapaian lain yang mungkin saja belum terkalkulasi dalam *report*.

Untuk mencapai target itu, sektor-sektor apa yang harus diprioritaskan penguatan ekosistemnya untuk melempangkan upaya mencapai target?

Kalau mengacu dari *ranking* Indonesia dalam *report* ini, pada semua sektor kita punya peluang untuk digenjot sebagai prioritas, kecuali mungkin sektor wisata halal.

Pemulihan sektor wisata halal diprediksi berlangsung lebih lama, karena di semua negara di dunia ini, sektor ini mengalami pukulan paling keras akibat Covid-19. Dalam SGIER 2020/2021, diprediksi pandemi memukul sektor wisata hingga minus 70%. Beda dengan sektor lain, sektor ini butuh waktu pemulihan lebih lama. Wisata halal diperkirakan baru akan mencapai level pencapaian seperti di tahun 2019, pada 2023. Dan kenaikan belanja wisatanya "hanya" 1,4% dari 2019 hingga 2024.

Jadi, sektor mana yang secara objektif bisa digenjot untuk mendapat hasil optimal?

Menurut saya, sama dengan rekomendasi pada laporan IHLC-DinarStandard 2018, yaitu *food*, keuangan Islam (baik yang konvensional maupun yang digital), fesyen, kosmetik, dan farmasi.

Namun, menurut saya, prioritas itu tidak semata pada *matter* sektornya, melainkan juga produk kebijakan yang mendukungnya, karena *size* dalam *report* ini bukan satu-satunya acuan. Yang paling penting adalah pengembangan dan penguatan ekosistem yang menunjang industri halal di suatu negara. Ke depan, salah satu pekerjaan rumah besar Indonesia adalah menciptakan ekosistem industri halal yang terintegrasi.

Sejauh mana *report* semacam ini memberi kontribusi dalam pencapaian target Indonesia menjadi produsen halal industri terbesar dunia?

Report seperti SGIER ini memberi sejumlah perspektif. Baik dalam tujuan menjadi produsen maupun menginventarisasi peluang investasi global. Laporan seperti ini dapat menjadi bekal kita untuk menyusun rencana pengembangan menjadi lebih terang dan terukur. Hebatnya, *report-report* semacam ini dibuat berdasarkan data, proyeksi, dan hasil analisis yang sistematis dan metodologis. Pasti *lah* ada plus minusnya, *tapi* menurut saya lebih banyak plusnya sebagai salah satu sumber rujukan.

Report ini, menurut saya, tidak hanya soal *ranking* atau angka-angka, melainkan peluang untuk mengimplementasikan secara nyata target-target menuju 2024.

Apa proyek IHLC berikutnya terkait *report*?

Saya berharap dapat bekerja sama dengan pihak yang kredibel menyusun *report* industri halal nasional yang *goes* global. Dengan begitu, akan memudahkan pasar global dan para investor untuk mengetahui peluang investasi industri halal di Indonesia. Juga sebagai referensi pelaku usaha dalam negeri dalam mengembangkan industri halal.

Kalau belum memungkinkan untuk menyusun *report* menyangkut semua sektor halal ekonomi, kita bisa mulai dengan *report* nasional per sektor. Misalnya, *report* nasional produk *halal food*. ■

VIRA TALISA & IKAN CUPANG

BIDUAN Vira Talisa punya kisah unik selama masa pandemi ini. Ketika ia mencoba hal-hal baru untuk mengisi waktu saat diberlakukan pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB. Kegiatannya, dari mengajar bahasa Prancis bagi sesama musikus, mengurus tanaman, hingga memelihara ikan cupang.

"Pas awal-awal PSBB kita bahkan *sempet* kehilangan arah mau *ngapain*. Tawaran konser virtual ada pas akhir April," katanya kepada Muhammad Guruh Nuary dari GATRA.

Hobi baru yang digeluti perempuan 27 tahun ini berawal dari ingin menghidupkan suasana tiap sudut rumah. Ia pun memutuskan untuk memelihara tanaman. Awalnya hanya satu tanaman, lalu membeli jenis lain sehingga jumlahnya terus bertambah.

Sedangkan kegemaran baru memelihara ikan cupang, karena kebetulan ada bekas wadah tanaman berupa toples yangmenganggur -kemudian menjadi tempat nyamuk bertelur.

"Aku cari di Google.Ada salah satu masukan yaitu pelihara ikan. Yang *low maintenance* kan ikan cupang *sebenernya*, he, he, he," kata musikus dari jalur *indie* tersebut.

Penyanyi yang sarjana visualart dari Universitas Rennes, Prancis, ini menuturkan ada alasan lain juga sehingga akhirnya ia memilih memelihara ikan cupang. "Aku takutnya sibuk dan enggak terawat kan ikannya. Tapi ikan cupang salah satu yang memang tahan banting ya, jadi sampai hari ini masih sehat kok mereka," katanya.

Bagi Vira, memelihara ikan cupang dan tanaman sangat mengasyikkan. Ia baru dua bulan memelihara ikan bersirip warna-warni nan lucu bernama latin *Betta sp*. itu.

Awalnya, ia membeli dua ekor. Ayah Vira ternyata mempunyai hobi yang sama hingga meminta orang untuk membantu merawat ikan-ikannya. "Sekarang sudah ada enam ekor," katanya.

DOK.PRIBADI/ONARD

ADINDA SUKARDI & BERLARI DI KOTA TINGGI POLUTAN

ATLET lari nasional, Adinda Sukardi, sempat mengalami masalah pernapasan sekitar dua tahun. Ini terjadi setelah ia melakukan olahraga lari di salah satu kota yang tingkat pencemaran udara atau polusinya sangat tinggi.

Dalam konferensi pers virtual tentang hasil pemantauan udara Jabodetabek dari Nafas berjudul "Mau Olahraga? Pantau Udara!" Adinda mengungkapkan pengalaman buruk itu terjadi setelah lari di Shanghai. Konferensi pers ini dilaksanakan pada Selasa, 17 November 2020, yang diikuti pula oleh Wartawan GATRA, Iwan Sutiawan.

Kebetulan Adinda melancong ke kota di Negeri Tirai Bambu itu untuk menengok sang kakak yang sedang bekerja. "Pada pagi hari saya berlari hanya empat kilometer dan saat itu musim dingin, cuaca di luar itu memang agak abu-abu, *gray*," ucapnya.

Adinda tidak mengira itu polutan dan menyangka cuaca yang muram itu disebabkan musim dingin. Tanpa ragu, perempuan yang kini menjadi duta salah satu merek peralatan olahraga asal Amerika Serikat ini memacu derap kaki hingga mencapai torehan waktu tercepat untuk melahap jarak empat kilometer karena ditunjang kondisi tubuh yang sangat prima.

"Setelah lari empat kilometer itu, saya mulai bersuara mengi, *wheezing* kalau bahasa Inggris-nya, seperti orang yang mempunyai asma dan saya tidak pernah seumur hidup mempunyai kondisi asma," tuturnya.

Pengalaman buruk dan dampaknya yang relatif lama tersebut membuat Adinda membuka mata untuk memperhatikan kondisi udara sebelum berolahraga, agar tak memasukkan polutan ke paru-paru.

"Saya benar-benar membuat rutinitas selalu mengecek kualitas udara, agar saya bisa merencanakan *training session* saya per hari, bukan per minggu, karena memang kesulitan orang Jakarta di situ, karena kota kita berpolusi," katanya.

DOK.PRIBADI

BTN Menggelar Asset Sales Festival

DOK. BTN

MENJELANG akhir 2020, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) sedang terus mempercepat pemulihan aset atau *recovery asset* dengan menggelar Asset Sales Festival. Acara yang digelar di empat kota besar, yakni Medan, Bandung, Surabaya, dan Makassar ini, menargetkan meraih dana Rp430 miliar. Acara Asset Sales Festival itu merupakan kelanjutan dari acara Asset Sales Festival yang sebelumnya diadakan di Jakarta pada Juli lalu.

Acara Asset Sales Festival diselenggarakan secara *offline* dan *online* untuk mempertemukan investor, pengembang, penjual properti, dan calon pembeli, agar dapat meraup keuntungan dalam bisnis properti. Aset properti yang ditawarkan tidak hanya berasal dari kredit konsumen, tetapi juga dari kredit komersial, termasuk aset bermasalah kelolaan BTN Syariah. Direktur Remedial and Wholesale Risk Bank BTN, Elisabeth Novie Riswanti, mengatakan bahwa BTN rutin menggelar Asset Sales Festival untuk memberikan peluang emas kepada para investor dan pengembang properti agar berinvestasi pada aset-aset properti murah yang dapat dijadikan aset produktif.

DOK. SWISS-BELHOTEL

Cultural Dinner Swiss-Belhotel Pondok Indah

SWISS-BELHOTEL Pondok Indah, Jakarta, kembali memanjakan pelanggannya dengan menyediakan *cultural dinner*, kali ini dengan tema makanan Korea. Program itu digelar selama bulan November dan Desember 2020 di restoran Swiss Cafe, Swiss-Belhotel Pondok Indah, dengan menerapkan standar protokol kesehatan.

Director Sales and Marketing Swiss-Belhotel Pondok Indah, Budi Utami, mengatakan bahwa *cultural dinner* yang digelar untuk pelanggan Swiss-Belhotel Pondok Indah ini, diharapkan dapat mengobati rindu mereka pada makanan ala Korea. Pengunjung dapat makan makanan Korea sepuasnya dengan hanya Rp360.000, sudah termasuk *free flow wine*.

Akar Pohon dan ITB 75 Green Menanam Pohon

YAYASAN Alam Hijau Lestari (Akar Pohon) menanam bibit pohon yang terdiri dari bibit pohon pala, manggis, cengkeh, beringin, dan bibit pohon kelapa di hulu sungai Cikaso, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Selasa 10 November 2020. Dalam kegiatan ini, donatur menyumbang 26.624 bibit pohon, terdari dari 8.866 bibit pohon disumbang oleh ITB 75 Green, yang akan ditanam bertahap dalam 7 hari, dari PT Triputra Agro Persada (TAP Group) sebanyak 3.000 bibit pohon, PT Spirok Oasis Investama 2.124 bibit pohon, PT Aetra Air 1.600 bibit pohon, PT Santi Yoga 1.600 bibit pohon, serta perorangan 9.434 bibit pohon.

Kegiatan penanaman dihadiri oleh Ketua Yayasan Alam Hijau Lestari, Allan Munir, Sektetaris Camat Desa Lengkong, Usep Supelita dan Kepala Desa Lengkong, H.Sulaeman ditambah unsur Muspika, Gapoktan dan Poktan Kecamatan Lengkong. Allan Munir mengimbau masyarakat agar gemar menanam pohon, karena kebaikan itu sangat bermanfaat di dunia dan akhirat. Pohon sangat bermanfaat bagi lingkungan, termasuk menjaga sumber air alami dan menyediakan udara segar.

DOK. ITB